

Komunikasi Antarbudaya

(Sikap Sosial dalam Komunikasi Antaretnis)

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Dr. Wawan Hernawan, M.Pd
Hanindyalaila Pienrasmi, M.A.

Komunikasi Antarbudaya

(Sikap Sosial dalam Komunikasi Antaretnis)



PUSAKA MEDIA

**Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)**

**KOMUNIKASI ANTARBUDAYA
(Sikap Sosial dalam Komunikasi Antaretnis)**

**Penulis:
Dr. Wawan Hernawan, M.Pd
Hanindyalaila Pienrasmi, M.A.**

Layout

Pusaka Media Design

x + 77 hal : 15.5 x 23 cm
Cetakan, Oktober 2018

ISBN: 978-602-5947-31-5

Penerbit

Pusaka Media
Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarama Bandarlampung
082280035489
email : cspusakamedia@yahoo.com
Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralistik yang terdiri dari berbagai etnis dengan keberagaman bahasa, agama, dan kepercayaan serta kebudayaannya masing-masing. Keberagaman etnis dengan latar bahasa, budaya, dan keyakinan dalam suatu tatanan kehidupan sosial merupakan titik rawan bagi terjadinya konflik antaretnis. Konflik yang terjadi dalam lingkup kehidupan manusia, baik konflik antarindividu maupun konflik antarkelompok (etnis) merupakan kegagalan dalam membangun komunikasi. Kegagalan dalam membangun komunikasi sebagai akibat dari kekeliruan dalam memaknai pesan-pesan yang dipertukarkan selama proses komunikasi berlangsung. Karenanya, untuk membangun hubungan yang harmonis dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan perlu dibangun komunikasi yang harmonis.

Komunikasi yang harmonis tidak tercipta dengan sendirinya, namun perlu adanya upaya dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pemaknaan pesan-pesan yang dipertukarkan menjadi penting untuk terbentuknya pemahaman bersama atas pesan-pesan tersebut. Membangun pemahaman bersama atas pesan-pesan yang dipertukarkan, bukan merupakan suatu proses yang sederhana, apalagi dalam lingkup keberagaman etnis dengan latar budaya, bahasa, dan nilai-nilai keyakinan yang berbeda.

Kehadiran buku ini merupakan buku ajar sebagai pelengkap dalam perkuliahan komunikasi antarbudaya pada program studi ilmu komunikasi. Buku ini menyajikan pemikiran tentang bagaimana

membangun komunikasi yang harmonis dalam tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan dengan keberagaman etnis. Bagaimana upaya mengantisipasi agar tidak terjadi konflik, baik konflik antarindividu maupun konflik antarkelompok (etnis) merupakan bagian dari pembahasan di dalam buku ini. Buku ini juga mengetengahkan tentang model penyelesaian konflik antaretnis. Karenanya pemahaman terhadap buku ini menjadi penting bagi para akademisi dan praktisi yang menaruh minat dan perhatiannya dalam bidang kajian komunikasi antarbudaya, dan lebih spesifik lagi dalam bidang sikap sosial dalam komunikasi antaretnis.

Bandar Lampung, November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Komunikasi Antarbudaya.....	1
1.2 Kajian Komunikasi Antarbudaya	5
1.3 Nilai dan Norma Budaya	8
BAB 2 KOMUNIKASI ANTARETNIS	11
2.1 Pluralitas Etnis	11
2.2 Pandangan Teori Tindakan Sosial dalam komunikasi Antaretnis.....	14
2.3 Pandangan Teori Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Antaretnis.....	16
2.4 Panandangan Teori SikapSosial dalam Komunikasi Antaretnis.....	19
2.5 Pandangan Teori Akomodasi dalam Komunikasi Antaretnis	22

2.6	Peranan Komunikasi Interpersonal dalam Komunikasi Antaretnis.....	24
2.7	Peranan Komunikasi Kelompok dalam Komunikasi Antaretnis.....	24

BAB 3 SIKAP SOSIAL DALAM KOMUNIKASI

	ANTARETNIS	27
3.1	Hakikat dan Obyek Sikap sosial.....	27
3.2	Komponen Sikap Sosial.....	29
3.3	Pembentukan dan Perubahan Sikap Sosial.....	31
3.3.1	Sikap Dibentuk Oleh Keinginan	32
3.3.2	Sikap Dibentuk oleh Informasi yang Diperoleh.....	32
3.3.3	Sikap Dibentuk oleh Afiliasi Kelompok.....	35
3.3.4	Sikap Mencerminkan Kepribadian.....	36
3.4	Sikap Sosial dalam Komunikasi Antarindividu	37
3.5	Sikap Sosial dalam Komunikasi Kelompok.....	

BAB 4 PERSEPSI DAN PRASANGKA SOSIAL DALAM

	KOMUNIKASI ANTARETNIS.....	45
4.1.	Persepsi dalam Komunikasi Antaretnis	45
4.2	Prasangka Sosial dalam Komunikasi Antaretnis	49

BAB 5 BENTUK KONFLIK DALAM KOMUNIKASI

	ANTARETNIS.....	51
5.1	Etnosentrisme.....	51
5.2	Stereotif.....	54

BAB 6 PERAN KEPEMIMPINAN DALAM KOMUNIKASI

ANTARETNIS	60
6.1 Pengertian Kepemimpinan.....	60
6.2 Pemimpin dalam Situasi Krisis	64
6.3 Nilai dan Norma Budaya Lokal sebagai Alat pemersatu	66
DAFTAR PUSTAKA.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Pola hubungan sikap sosial dan jarak sosial dalam komunikasi antaretnis	28
Gambar 3.2	Sikap sosial dalam komunikasi antar pribadi sebagai landasan bagi penyelesaian konflik antaretni.....	40
Gambar 3.3	Pola komunikasi antarkelompok Etnis	44
Gambar 4.1	Persepsi individu/kelompok etnis terhadap individu atau kelompok etnis lainnya dalam proses Komunikasi	49
Gambar 4.2	Tingkat ketahanan kelompok dalam menghadapi pengaruh-pengaruh kelompok lainnya dalam situasi konflik antar kelompok etnis	50
Gambar 5.1	Pola tindak kekerasan yang terjadi dalam komunikasi antaretnis sebagai akibat dari prasangka sosial yang telah terbentuk sebelumnya	59
Gambar 6.1	Peranan nilai dan norma budaya sebagai dasar bagi penyelesaian konflik antaretnis	70
Gambar 6.2	Model Penyelesaian Konflik Antaretnis.....	71

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Komunikasi Antarbudaya

Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain. Pentingnya manusia dalam hubungannya dengan membutuhkan orang lain hanya dapat dipenuhi melalui komunikasi, karenanya dalam kehidupan manusia, proses komunikasi tak dapat dihindarkan. Dengan kata lain, kehidupan manusia ditandai dengan adanya dinamika komunikasi. Seluruh umat manusia di muka bumi ini perlu menyadari bahwa kebutuhan hidupnya hanya akan terpenuhi jika ia berkomunikasi dengan orang lain. Dalam hubungannya dengan kehidupan dalam sebuah keluarga, setiap anak bercengkrama dengan ibu dan bapaknya, tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sedang saling bertukar informasi, bertukar pengalaman, berdialog dan berdiskusi untuk sebuah komunikasi. Hal tersebut merupakan proses komunikasi. Dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat, kita berhubungan dengan tetangga, dan berkenalan dengan orang lain, berbagi informasi dan pengalaman dalam suatu pembicaraan. Dalam pertukaran informasi, pengalaman, ide dan gagasan, latar sosial budaya orang-orang yang terlibat dalam tindak komunikasi turut

memberikan andil yang perlu mendapat perhatian, karenanya untuk dapat mempermudah proses komunikasi, komunikator perlu memahami secara lebih baik latar belakang sosial budaya komunikannya. Setiap orang dalam melakukan komunikasi memiliki berbagai tujuan, Sebagaimana diungkapkan oleh Myers dan Myers (1988: 4-6):

Maksud seseorang berkomunikasi antara lain untuk mempelajari dirinya sendiri, untuk mempelajari dunia yang ada di sekitarnya, untuk berbagi informasi, untuk membujuk atau mempengaruhi, untuk memperoleh kesenangan, bermain dan mengurangi kekakuan.

Masyarakat terintegrasi dalam kehidupan sosial yang harmonis karena adanya komunikasi. Melalui komunikasi, masyarakat dengan berbagai kelompok dan golongan yang terdapat di dalamnya mampu menyatu dan terintegrasi dalam suatu ikatan dan norma yang diakui bersama. Melalui komunikasi pula setiap anggota masyarakat dapat bekerja sama dengan anggota masyarakat yang lainnya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan alat utama dalam keberlangsungan hidup manusia dalam bermasyarakat. Pertukaran pengalaman, ide dan gagasan dari satu orang kepada orang lain atau kepada kelompok, dari kelompok kepada orang lain atau kepada kelompok lainnya, terjalin melalui komunikasi. Dalam hubungannya dengan fungsi sosial, Mulyana, (2002: 5) mengungkapkan:

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa komunikasi merupakan kunci terjadinya proses sosial, yakni kontak sosial yang disertai maksud-maksud tertentu melalui proses penafsiran pesan dan perilaku orang lain, baik dalam wujud pembicaraan maupun dalam wujud sikap dan gerak-gerik. Proses sosial terjadi dalam kepentingan yang bersifat asosiatif (kerja sama). Proses kerja sama tersebut dibentuk sejak masa kanak-kanak, baik dalam lingkungan keluarga dan kekerabatan maupun dalam lingkungan pergaulan di masyarakat. Proses kerja sama dalam lingkungan masyarakat merupakan proses sosial yang terdiri dari sekumpulan orang-orang dalam situasi saling ketergantungan dan saling menguntungkan, meskipun di dalamnya tidak menutup kemungkinan terjadi persaingan yang berkecenderungan mengakibatkan munculnya konflik. Bentuk-bentuk kerja sama dalam suatu masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Purwasito (2003: 83) dapat dilalui dengan cara:

- (1) *Bargaining*, yakni sebuah pelaksanaan pertukaran, perjanjian barang, politik dan jasa; (2) *Cooperation*, yakni proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik untuk menghindari kegoncangan; (3) *Coalition*, yaitu penyatuan dua organisasi atau lebih dengan tujuan mencapai kepentingan bersama.

Dalam komunikasi sosial, temuat juga komunikasi antarbudaya. “Implisit dalam fungsi komunikasi sosial kultural” (Mulyana, 2002:6). Dalam konteks komunikasi antarbudaya sumber pesan dan penerima pesan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Dengan adanya perbedaan budaya antara sumber pesan dan penerima pesan, maka komunikasi dihadapkan kepada suatu masalah penyandian pesan. Dalam hal demikian, pesan yang disandi dalam suatu budaya harus disandi balik dalam budaya yang berbeda.

“Dalam berkomunikasi antarbudaya, kita patut mensyukuri kebersamaan dan belajar untuk bersikap toleran terhadap perbedaan serta mengelola konflik antarbudaya secara sehat, hingga belajar menertawakan kelemahan diri sendiri” (Liliweri, 2003:227). Berdasarkan hal tersebut, dalam berkomunikasi antarbudaya memerlukan adanya sikap toleransi atas perbedaan, yakni suatu kemampuan diri untuk dapat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi yang sedang berlangsung sebagai apa adanya, bukan seperti apa yang kita kehendaki. Purawasito (2003:182) menyebutnya dengan istilah empati untuk mengatasi perbedaan yang terjadi dalam tindak komunikasi antarbudaya, yakni suatu upaya menempatkan diri pada posisi lawan bicara; suatu perspektif komunikasi yang didasarkan pada asumsi bagaimana kita dapat membayangkan pikiran dan perasaan orang lain dari perspektif mereka sendiri . Karenanya efektivitas komunikasi antarbudaya sangat tergantung dari sejauh mana perbedaan-perbedaan tersebut dapat diatasi oleh partisipan komunikasi.

Seluruh rangkaian proses komunikasi pada akhirnya menggantungkan keberhasilannya pada tingkat ketercapaian tujuan komunikasi, yakni sejauh mana para partisipan memberikan makna yang sama atas pesan yang dipertukarkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Gudykunst (dalam Liliweri, 2003:227-228)

“jika dua orang atau lebih berkomunikasi antarbudaya secara efektif, maka mereka akan berurusan dengan satu atau lebih pesan yang dipertukarkan, mereka harus memberikan makna yang sama atas pesan. Singkatnya komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang dihasilkan oleh kemampuan para partisipan komunikasi lantaran mereka berhasil menekan sekecil mungkin kesalahpahaman”.

Berdasarkan uraian di atas, kesalahpahaman dalam berkomunikasi antarbudaya atas pesan-pesan yang dipertukarkan merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai komunikasi antarbudaya yang efektif; sebab semakin tinggi tingkat perbedaan antarbudaya akan semakin besar kemungkinan untuk terjadi kesalahpahaman. Sehubungan dengan hal tersebut, Everet dan Lawrence Kincaid (dalam Liliweri, 2003:228) mengungkapkan bahwa “komunikasi antarbudaya yang efektif terjadi jika muncul *mutual understanding*, yakni komunikasi yang saling memahami”. Adapun yang dimaksud dengan saling memahami dalam hal tersebut adalah terciptanya suatu keadaan pada diri seseorang dapat memperkirakan bagaimana orang lain memberi makna atas pesan yang dikirim dan menyandi balik pesan yang diterima, dengan kata lain partisipan yang terlibat dalam komunikasi antarbudaya sama-sama memahami pesan yang dipertukarkan.

1.2 Kajian Komunikasi Antarbudaya

Sebagaimana dikemukakan di atas, komunikasi dan kebudayaan merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Pusat perhatian komunikasi dan kebudayaan terdapat pada variasi langkah dan cara manusia berkomunikasi melintasi komunitas manusia atau kelompok sosial. Pelintasan komunikasi itu menggunakan kode-kode pesan, baik secara verbal maupun non-verbal yang secara alamiah selalu digunakan dalam semua konteks interaksi. Pusat perhatian studi komunikasi dan kebudayaan meliputi bagaimana menjajagi makna, pola tindakan, dan bagaimana makna serta pola tindakan tersebut diartikulasikan dalam sebuah kelompok sosial, kelompok budaya, kelompok keagamaan, dan kelompok-kelompok sosial lainnya dalam suatu interaksi sosial. Komunikasi antarbudaya dilakukan:

1) Dengan negosiasi untuk melibatkan manusia di dalam pertemuan antarbudaya yang membahas satu tema (penyampaian tema melalui simbol) yang sedang dipertukarkan. Simbol tidak dengan sendirinya mempunyai makna tetapi dia dapat berarti dalam suatu konteks, dan makna-makna itu dinegosiasikan; (2) Melalui pertukaran sistem simbol yang tergantung dari persetujuan antarsubjek yang terlibat dalam komunikasi, sebuah keputusan dibuat untuk berpartisipasi dalam proses pemberian makna yang sama; (3) Sebagai pembimbing perilaku budaya yang tidak terprogram namun bermanfaat karena mempunyai pengaruh terhadap perilaku kita; (4) Menunjukkan sebuah fungsi kelompok dan mengidentifikasinya dengan pelbagai cara (Liliweri, 2003: 13)

Pembahasan kajian komunikasi antarbudaya meliputi subyek, wilayah dan fokus. Sebagaimana dikemukakan oleh Purwasito (2003: 143-183):

Subyek kajian komunikasi antarbudaya mencakup komunikasi antarrasial, komunikasi antaretnik, komunikasi antaragama, komunikasi antarkelas, dan komunikasi antarjender. Wilayah kajian komunikasi antarbudaya meliputi level antarpersona, level kelompok, level organisasi, level masyarakat dan level internasional. Sedangkan fokus kajiannya mencakup penyandian, representasi, persepsi, hambatan, prasangka, empati, dan umpan balik.

Komunikasi antarbudaya mengacu kepada komunikasi antara orang-orang dari budaya yang berbeda, antara orang-orang yang memiliki kepercayaan, nilai, atau cara berperilaku kultur yang berbeda (Devito, 1997:479). Purwasito (2003:133) mengungkapkan, “Komunikasi mengkaji upaya manusia untuk melewati jarak budaya orang lain yang asing baginya guna membangun masyarakat global yang penuh persahabatan dan perdamaian”.

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, komunikasi antarbudaya membicarakan berbagai proses komunikasi karena pengaruh perbedaan budaya. Dalam melakukan interaksi, setiap partisipan komunikasi akan berusaha menyesuaikan diri dengan budaya orang lain. Konsekuensi dari hal tersebut dikemukakan oleh Liliweri (2003:14) adalah “Interaksi dan komunikasi yang sedang dilakukan itu membutuhkan tingkat keamanan dan sopan santun tertentu, serta peramalan tentang aspek-aspek tertentu terhadap lawan bicara”. Ada tiga hal tujuan mempelajari komunikasi antarbudaya, yakni:

- 1) Membangun saling percaya dan saling menghormati sebagai bangsa berbudaya dalam upaya memperkokoh hidup berdampingan secara damai, (2) Kritis terhadap *cultural domination* dan *cultural homogenization*, menerima perbedaan budaya sebagai sebuah berkah daripada bencana, (3) upaya melakukan usaha-usaha damai dalam upaya mereduksi perilaku agresif dan mencegah terjadinya konflik yang merusak peradaban dengan cara membuka dialog untuk mencapai titik kesepahaman (Purwasito, 2003:44)

Berdasarkan pendapat tersebut, melalui komunikasi antarbudaya diharapkan tumbuh dan berkembang sikap saling pengertian antarkelompok dengan latar budaya yang berbeda dengan jalan mempersempit kesalahpahaman melalui pencairan prasangka-prasangka rasial, etnik, primordial dari kelompok-kelompok yang memiliki budaya yang berbeda serta berusaha menyumbangkan visi hidup bersama dalam alam globalisasi. Dengan kata lain, komunikasi antarbudaya diarahkan untuk memperoleh tingkat pemahaman antarrasial, antaretnik, antarpemeluk agama yang berbeda, antargolongan dan kelas dalam masyarakat sehingga tercipta kerukunan hidup dalam kerangka hidup berdampingan secara damai. Dalam perspektif tersebut, komunikasi antarbudaya lebih melihat komunikasi interpersonal sebagai unit analisisnya. Hal tersebut berkaitan erat dengan tema-tema pembahasan dalam tingkat dialogis

dalam upaya membangun kerja sama antargolongan. Sebagaimana dikemukakan oleh Liliweri (2003: 13) bahwa “komunikasi antarbudaya merupakan komunikasi antrapribadi dengan latar belakang budaya yang berbeda”.

1.3 Nilai dan Norma Budaya

Komunikasi antarbudaya yang efektif adalah adanya pemahaman bersama atas makna dari pesan-pesan yang dipertukarkan, terutama bagaimana meletakkan makna dalam nilai kebudayaan yang siap diterima. “Nilai merupakan standard tingkah laku tentang baik dan buruk (positif atau negatif) yang dipahami bersama oleh masyarakat” (Krech *at.al.* 1962:349). Sejalan dengan hal tersebut, Liliweri (2003:50) menjelaskan “nilai merupakan sesuatu yang penting dalam unsur kebudayaan, nilai membimbing manusia untuk menentukan apakah sesuatu itu boleh atau tidak dilakukan”. Dengan kata lain nilai budaya akan membentuk sikap anggota masyarakatnya tentang sesuatu apakah benar atau salah, baik atau buruk, jelek atau indah berkenaan dengan suatu peristiwa, tindakan, ataupun suatu keadaan tertentu. Sejalan dengan hal tersebut Purwasito (2003:229) menyebutkan “nilai adalah apa yang sebaiknya dilakukan dan apa yang buruk untuk dilakukan”. Lebih lanjut diungkapkan bahwa:

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal ini disebabkan oleh karena nilai-nilai budaya adalah konsep mengenai apa yang ada dan hidup di alam pikiran manusia, apa yang mereka anggap bernilai, berharga, yang penting dan tidak penting sehingga sistem nilai tersebut berguna sebagai pedoman berperilaku, memberi arah dan orientasi kepada setiap warga masyarakat untuk menjalankan kehidupan (Purwasito, 2003:229)

Berbeda dengan nilai yang meliputi tentang sesuatu apakah benar atau salah, baik atau buruk, jelek atau indah berkenaan dengan suatu peristiwa, tindakan, ataupun suatu keadaan tertentu, maka norma meliputi apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian norma merupakan kontrol atas suatu perilaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Krech *at.al.* (1962:351), “Norma yang terdapat dalam suatu masyarakat merupakan alat pengatur tingkah laku para anggotanya”. Berdasarkan hal tersebut, norma mempengaruhi tingkah laku para anggotanya. Tingkah laku atau tindakan setiap anggota masyarakat dibatasi oleh norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Bagi mereka yang tidak mengindahkan norma atau melanggar norma masyarakat, mereka akan mendapat hukuman. “Sebuah norma adalah aturan yang mengatur tentang hukuman atau ganjaran dalam pelbagai bentuk sesuai dengan variasi dan posisi sosial orang dalam relasi antarmanusia” (Liliweri, 2003:53).

Kebiasaan (*folkways*) sebagaimana dikemukakan oleh Krech *at.al.* (1962:351) “adalah cara-cara yang berlaku dalam suatu masyarakat yang mengatur para anggotanya yang tingkat kesetujuannya tidak dianggap vital”. Sejalan dengan hal tersebut, Sumnner mengartikan kebiasaan sebagai “aturan yang dapat dilihat dalam pelbagai situasi, namun tidak cukup kuat untuk mengatur kelompok” (Liliweri, 2003:53). Kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang karena perbuatan itu disukai orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu. Sebagai contoh, pada saat lebaran iedul fitri orang-orang muslim saling bersalam-salaman dengan para tetangga, kerabat, dan para koleganya. Bagi mereka yang tidak melakukannya tidak dikenakan sanksi apa-apa; hanya kemungkinan akan dianggap kurang sopan atau sombong.

Tata kelakuan (*mores*) “merupakan norma tingkah laku yang penting dan vital dalam suatu masyarakat dan termasuk sebagai dasar nilai-nilai moral. Larangan-larangan lebih tegas disertai dengan keharusan untuk mematuhi” (Krech *at.al.* 1962:352). Berdasarkan pendapat tersebut, tata kelakuan berisi perintah sekaligus larangan yang secara langsung merupakan alat agar setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan. Tata kelakuan memaksa para anggotanya bertingkah laku secara legal melalui sanksi sosial. Jika ada seseorang yang melanggar norma ini akan dikenakan hukuman dengan berbagai cara sesuai dengan sanksi norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. “Tata kelakuan yang terintegrasi secara kuat dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi adat istiadat (*custom*)” (Liliweri, 2003:55). Anggota masyarakat yang melanggar norma ini akan menerima sanksi yang keras yang terkadang diberlakukan secara tidak langsung.

BAB 2

KOMUNIKASI ANTARETNIS

2.1 Pluralitas Etnis

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralistik yang terdiri dari berbagai etnis dengan keberagaman bahasa, agama, dan kepercayaan serta kebudayaannya masing-masing. Setiap etnis dengan bahasa, agama, dan kepercayaan serta kebudayaannya masing-masing, merupakan bagian dari sistem sosial yang mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zamannya menuju kepada peradaban budaya yang lebih mapan. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam suatu sistem sosial tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan, baik terhadap individu maupun terhadap kelompok-kelompok yang ada di masyarakat yang bersangkutan. Ketegangan-ketegangan yang muncul baik dalam individu maupun dalam kelompok dapat menjurus kepada munculnya konflik; baik konflik anatarindividu, individu dengan kelompok, maupun antarkelompok. Jika keadaan demikian tidak segera mendapat perhatian dan penanganan yang serius, dapat menjadi ancaman bagi integritas suatu bangsa.

Dengan komposisi masyarakat yang memiliki latar belakang etnis, agama, sosiokultur, dan sosioekonomi yang beragam, maka bangsa Indonesia berada dalam situasi yang rawan terhadap kemungkinan terjadinya berbagai konflik dan pertentangan kepentingan antargolongan yang pada gilirannya akan mengganggu keutuhan nasional. Sebagai-mana dikemukakan oleh Nasikun (1995: 4):

“Konflik dan integritas nasional masih akan tetap menjadi masalah yang rawan bagi bangsa Indonesia, terutama oleh karena proses pembangunan yang akan terus-menerus meningkat pada masa-masa mendatang akan mengakibatkan kepentingan-kepentingan berbagai golongan menjadi semakin mengemuka dan saling berhadapan satu sama lain”.

Ketika keutuhan nasional ini terusik, maka pembangunan nasional pun akan menjadi terhambat, bahkan lebih lanjut lagi akan mengakibatkan kemandegan pembangunan. Kenyataan menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia dibentuk oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, yang selain merupakan unsur kekayaan rohaniah yang dapat memperkokoh kehidupan nasional (faktor integratif), juga sekaligus menyimpan potensi konflik (faktor disintegratif) yang sangat dalam akibatnya dan sangat luas implikasinya. “Meskipun berbagai kelompok budaya (ras, suku, agama) saling berinteraksi, tidak secara otomatis saling pengertian terbentuk di antara mereka” (Mulyana, 2001:12). Kondisi demikian, meminjam istilah Goddard (2000:5) “karena adanya penilaian dengan menggunakan standar ganda”, yakni suatu komunikasi yang ditandai dengan retorika kami yang benar dan mereka yang salah; memandang dan menilai suatu komunitas tertentu dengan menggunakan acuan norma kelompok/golongannya sendiri.

Untuk menciptakan toleransi (kerukunan hidup) antaretnis, faktor komunikasi memegang peranan penting. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyana (2002:7), “bahwa komunikasi itu penting untuk membangun konsep diri kita,

aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, dan menghindarkan diri dari tekanan dan ketegangan”. Melalui komunikasi memungkinkan manusia untuk lebih dapat memahami berbagai faktor yang menjadi penyebab munculnya konflik. “Hanya melalui pemahaman yang mendalam akan sumber-sumber yang menyebabkannya, maka konflik-konflik sosial di antara sesama bangsa Indonesia dapat kita hindarkan atau kita jinakkan” (Nasikun, 1995:5). Karenanya, mozaik budaya itu sungguh perlu dipahami dan dimanfaatkan untuk dijadikan pilar-pilar kekuatan dan ketangguhan nasional” (Lutan, 2001:58).

Dengan terwujudnya kerukunan hidup antaretnis, minimum terjaminnya serta dihormatinya identitas mereka oleh pihak lain, mereka masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan meletakkan landasan moral, etik dan spiritual sebagai landasan bagi terwujudnya stabilitas nasional yang mantap dan dinamis yang sangat diperlukan untuk kemantapan jalannya pembangunan nasional. Pada dasarnya makna terpenting dari terwujudnya kerukunan hidup antaretnis adalah sebagai indikasi kokohnya sikap saling percaya mempercayai antara sesama masyarakat yang mempunyai latar belakang etnis yang berlainan. Dengan terbentuknya sikap saling mempercayai itu, akan tercipta kondisi yang saling menguntungkan untuk mewujudkan kerja sama seluruh lapisan dan golongan dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Sebaliknya, ketidakrukunan antaretnis merupakan indikasi dari adanya suasana saling curiga mencurigai antaranggota/kelompok dalam masyarakat. Suasana yang demikian ini sewaktu-waktu dapat menimbulkan konflik antetnis yang dapat dengan mudah bereskalasi menjadi huru-hara. Ketika kondisi ini muncul ke permukaan, peran para pemuka adat yang sangat penting adalah bagaimana mengajarkan pengendalian diri dan menegakkan nilai, moral, dan norma budaya, menumbuhkan toleransi dan sikap bertanggung jawab.

Melalui kajian komunikasi antarbudaya, diharapkan dapat terbentuk adanya sikap saling percaya dan saling menghormati antaretnis sebagai bangsa yang berbudaya dalam rangka memperkokoh hidup berdampingan secara damai, dapat menerima perbedaan budaya sebagai berkah daripada bencana, dan melakukan upaya damai dengan mereduksi perilaku agresif, serta mencegah terjadinya konflik yang dapat merusak peradaban dengan cara menciptakan forum-forum dialog untuk mencapai kesepahaman. Lembaga *Conflict Research Consortium, University of Colorado, USA*, dalam uraiannya bertema *Peace, Culture and Society* (Liliweri, 2003:38) mengemukakan “betapa pentingnya peranan komunikasi untuk membatasi atau mengurangi kesalahpahaman”.

2.2 Pandangan Teori Tindakan Sosial dalam Komunikasi Antaretnis

Pendekatan yang dapat dijadikan acuan sebagai salah satu acuan dalam menganalisis masalah keberagaman etnis dalam upaya menciptakan kerukunan hidup antaretnis adalah teori Tindakan Sosial (*Social Action*). Sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber bahwa “tindakan sosial meliputi semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna subyektif terhadap perilaku tersebut” (Mulyana, 2001:61). Inti tesisnya adalah tindakan yang penuh arti dari individu. Jadi yang dimaksud dengan tindakan sosial dalam hal ini adalah tindakan individu sepanjang tindakan tersebut mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Dengan demikian tindakan yang diarahkan kepada benda mati tanpa dihubungkan dengan tindakan orang lain, bukanlah merupakan tindakan sosial. “Tindakan bermakna sosial, sejauh berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan oleh individu atau individu-individu dengan mempertimbangkan perilaku orang lain dan diorientasikan dalam penampilannya” (Ritzer, 2016:43-44).

Sebagai seorang teoretisi dalam bidang sosiologi, Weber merumuskan sosiologi sebagai ilmu yang berusaha melakukan pemahaman interpretif (*interpretive understanding*) tentang tindakan sosial serta hubungan sosial untuk sampai pada penjelasan kausal. Dalam definisi tersebut terkandung dua konsep dasar. Pertama, konsep tentang tindakan sosial. Kedua, konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep penafsiran dan pemahaman menyangkut masalah metode untuk menjelaskan konsep tentang tindakan sosial. Tindakan sosial yang dimaksudkan oleh Weber adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi sipelaku itu sendiri yang pikiran-pikirannya secara aktif saling menafsirkan perilaku orang lain, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-masing sesuai dengan maksud komunikasinya. Bertolak dari konsep dasar tentang tindakan sosial dan antarhubungan sosial, Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian, yakni:

- 1) *Tindakan manusia, yang menurut si pelaku mengandung makna subyektif; meliputi berbagai tindakan nyata.*
- 2) *Tindakan dalam hal ini dapat merupakan tindakan terbuka dan tersembunyi serta bersifat subyektif.*
- 3) *Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam.*
- 4) *Tindakan itu diarahkan kepada individu atau kepada beberapa individu.*
- 5) *Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan diarahkan kepada orang lain itu (Ritzer, 2016:45).*

Konsep dasar tentang penafsiran dan pemahaman menyangkut masalah bagaimana mempelajari dan memahami tindakan sosial tersebut. Hal ini jelas menyangkut masalah metode. Dalam hal ini Weber memandang bahwa perilaku individu, atau beberapa individu yang nampak hanyalah sebahagian saja dari keseluruhan perilaku. Karenanya jika seseorang hanya meneliti perilaku saja, dia tidak akan yakin

bahwa perbuatan itu mempunyai arti subyektif dan diarahkan kepada orang lain. Selain itu, kekuatan-kekuatan tersembunyi yang menggerakkan manusia seperti emosi, gagasan, maksud, perasaan, tekad, dan motif dari suatu tindakan akan terabaikan. Untuk dapat memahami dan menginterpretasi-tindakan-tindakan sosial dengan tidak mengabaikan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang menggerakkan manusia, Weber menyarankan melalui pemahaman interpretif (*interpretive understanding*).

2.3 Pandangan Teori Interaksi Simbolik dalam Komunikasi Antaretnis

Teori lainnya yang dapat dijadikan acuan dalam menganalisis masalah keberagaman etnis dalam upaya menciptakan kerukunan hidup antaretnis adalah teori interaksi simbolik. Sebagian pakar berpendapat, “teori interaksi simbolik khususnya dari George Herbert Mead sebenarnya masih berada di bawah payung teori tindakan sosial yang dikemukakan filosof dan sosiolog Jerman Max Weber” (Mulyana, 2001:60). “George Herbert Mead secara umum dipandang sebagai pelopor utama pergerakan interaksionis” (Littlejohn, 1995:160). Pendekatan ini memfokuskan unit analisisnya pada sifat dan hakekat interaksi, yaitu dimana individu menginterpretasi-kan dan memberikan makna terhadap obyek, peristiwa dan situasi yang memungkinkan individu berpikir positif tentang orang lain. Sebagaimana dikemukakan oleh Mead bahwa “Teori interaksi simbolik dirangkum dalam tiga konsep dasar yakni masyarakat (*society*), pikiran (*mind*), dan diri (*self*)” (Littlejohn, 1995:161). Ketiga konsep dasar tersebut merupakan aspek-aspek yang berbeda dari proses umum yang sama yaitu tindakan sosial. Tindakan sosial merupakan konsep dasar yang menjadi payung hampir seluruh proses psikologis dan sosial lainnya. Tindakan berhubungan satu dengan lainnya dan tersusun dalam urutan tertentu sepanjang kehidupan.

Tindakan dimulai dengan adanya dorongan hati yang melibatkan persepsi, interpretasi, pelatihan mental, pertimbangan-pertimbangan alternatif, dan perwujudan.

Dengan berlandaskan pada tindakan sosial, Mead memandang masyarakat sebagai kumpulan individu yang sedang melakukan interaksi dalam mengambil peran komunikasi dan melakukan interpretasi yang secara bersama-sama menyesuaikan tindakannya, mengarahkan dan mengontrol diri serta perspektif (Garna, 1996:76).

Selanjutnya diungkapkan oleh Littlejohn (1996:161) bahwa “kerja sama antaretnis membutuhkan adanya saling pengertian terhadap maksud dan tujuan dari masing-masing pihak”. Karenanya berpikir (*mindin*) adalah sebuah proses untuk mengetahui tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang pada masa mendatang, bagian “mencoba mengetahui” orang lain adalah sebuah proses untuk memahami apa yang akan dilakukan seseorang kemudian. Kerja sama merupakan proses membaca aksi dan tujuan orang lain, serta menanggapi dengan cara yang tepat. Kerja sama yang demikian merupakan hal pokok dari komunikasi interpersonal.

Dalam melakukan tindak komunikasi, manusia tidak terlepas dari penggunaan simbol-simbol. Simbol tersebut diinterpretasikan dan pada akhirnya membentuk suatu arti yang dihubungkan dengan kehidupan sosial. Apapun arti yang diberikan oleh seseorang terhadap suatu hal, merupakan hasil interaksi dengan orang lain tentang obyek yang dibahasnya. Hal yang khusus bagi kaum interaksionis terhadap arti adalah penekanannya pada interpretasi yang dilakukan secara sadar. Sebuah obyek memiliki arti bagi seseorang pada saat orang tersebut berpikir tentang atau menginterpretasikan obyek tersebut. Proses menangani arti ini pada dasarnya adalah percakapan internal. Pelaku memilih, memeriksa, menanggapi, mengelompokkan kembali, dan mengubah arti sesuai dengan situasi di mana ia berada dan sesuai dengan arah tindakannya.

Karenanya, masyarakat terdiri dari suatu jaringan interaksi sosial di mana para anggotanya memberikan arti kepada aksi-aksi mereka sendiri maupun orang lain melalui penggunaan simbol-simbol.

“Mead membedakan antara dua tingkat interaksi; yakni isyarat dan lambang. Blumer mengartikannya sebagai interaksi nonsimbolis dan interaksi simbolis” (Fisher 1986:234). Suatu isyarat atau yang bukan lambang merupakan tindakan yang impulsif dan bersifat spontan dalam arti respon refleks. Hakekat dari interaksi nonsimbolis ini tidak adanya proses interpretatif. Tindakan atau obyek secara langsung menimbulkan tindakan yang lain, tidak ada penunjukan diri dan tidak ada penafsiran. Sedangkan interaksi simbolis menuntut adanya proses sosial internal (dalam diri orang) yang berupa penunjukan diri serta penafsiran. Selain itu, proses sosial tersebut mencakup bagaimana “saya” dapat berlaku terhadap obyek lambang maupun bagaimana orang lain diamati berlaku terhadapnya. Menurut Mead, arti lambang sepenuhnya tergantung pada kemampuan individu dalam menempatkan dirinya dalam peran “orang lain” dan bertanya kepada dirinya sendiri bagaimana kiranya “orang lain” akan memberikan respon seandainya ia berada pada situasi yang sama. Sebagaimana dikemukakan Littlejohn (1996:161), “manusia menggunakan simbol-simbol dalam komunikasi mereka. Simbol tersebut diinterpretasikan oleh penerimanya yang kemudian membentuk arti yang dihubungkan dengan kehidupan sosial”. Johnson (1986:12), menegaskan bahwa “Karakteristik khusus dari komunikasi simbol manusia tidak terbatas pada isyarat-isyarat fisik, namun ia menggunakan kata-kata; yakni simbol-simbol suara yang mengandung arti dan bersifat standar”. Meltzer (dalam Fisher; 1986:236) “menyamakan simbol-simbol tersebut dengan bahasa; seperangkat lambang yang telah dibakukan, yang penafsirannya dimiliki secara bersama oleh para warga masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut”.

2.4 Pandangan Teori Sikap Sosial dalam Komunikasi Antaretnis

Tindakan sosial seseorang mencerminkan sikapnya, yakni suatu sistem yang menetap tentang penilaian baik positif maupun negatif, perasaan emosi, kecenderungan pro atau kontra terhadap obyek-obyek sosial (Krech *et al*, 1962:139). Obyek sikap adalah segala sesuatu yang ada pada diri individu. Sikap seseorang dapat berkembang sebagaimana orang tersebut dapat berkembang. Faktor-faktor yang dapat menentukan pembentukan sikap adalah keinginan individu, informasi, afiliasi kelompok dan kepribadian.

“Sikap berkembang dalam proses pemuasan keinginan” (Krech *et al*, 1962:181). Dalam menghadapi berbagai masalah untuk memenuhi keinginannya, individu mengembangkan sikap-sikapnya, yakni mengembangkan sikap-sikap yang menguntungkan terhadap obyek dan orang-orang yang dapat memuaskan keinginannya. Keinginan yang tak terpenuhi dapat menyebabkan terjadinya prasangka sosial. Prasangka sosial dapat menimbulkan kekecewaan, sakit mental, sikap yang tidak dapat diterima oleh masyarakat, pandangan-pandangan yang tidak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.

“Sikap individu dibentuk oleh informasi yang diperolehnya” (Krech *et al*, 1962:186). Informasi yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan sikap seseorang atau sekelompok orang dimana informasi yang menyebabkan terbentuknya sikap berhubungan dengan sikap-sikap yang lainnya. Demikian pula halnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, sikap individu maupun kelompok etnis tertentu terhadap kelompok etnis lainnya, sangat ditentukan oleh informasi yang diperoleh individu atau kelompok etnis yang bersangkutan tentang individu atau kelompok etnis lainnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Krech *et al* (1962:187), “Informasi baru yang diterima dapat membentuk sikap seseorang jika informasi tersebut terdapat kesesuaian dengan informasi yang

telah diterima sebelumnya”. Tidak semua sikap berorientasi pada fakta yang benar, salah satu contohnya adalah prasangka sosial. Kurangnya pengetahuan tentang fakta-fakta dapat menyebabkan interpretasi yang keliru tentang suatu obyek. Kesalahan interpretasi inilah yang dapat menyebabkan timbulnya prasangka sosial. Prasangka sosial yang muncul sebagai akibat ketidakpuasan suatu kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainnya dapat merusak sendi-sendi kerukunan hidup antaretnis. Dalam hal demikian, peran seorang pemuka adat diharapkan dapat memberikan bimbingan dan penjelasan tentang nilai dan norma budaya kepada individu yang memiliki latar nilai dan norma budaya yang sama. Peranan pemuka adat itu tidak hanya terbatas pada harapan dalam bentuk tingkah laku saja, melainkan juga meliputi motivasi, keyakinan, perasaan, sikap, dan nilai. Selain itu, ketidakbenaran fakta yang diterima pun dapat menimbulkan sikap-sikap yang negatif. Kebenaran fakta yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang sangat erat hubungannya dengan sumber informasi itu sendiri. Otoritas sumber akan sangat berpengaruh terhadap individu dalam menafsirkan informasi; selain itu sumber informasi akan sangat menentukan sifat informasi itu sendiri. Dalam menghadapi informasi, individu atau kelompok tidak begitu saja menerima informasi sebagai bahan pembentuk sikap, namun berlangsung dalam suatu proses penyaringan oleh individu atau kelompok yang bersangkutan.

“Afiliasi kelompok dari individu dapat menentukan pembentukan sikap individu yang bersangkutan” (Krech *et al*, 1962:191). Setiap individu dalam suatu kelompok tertentu akan memiliki sikap yang sejenis dalam kepercayaannya tentang suatu obyek, manusia, peristiwa, dan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Hal demikian oleh Mulyana (2002:4) disebut sudut pandang (*point of view*) atau perspektif. Lebih lanjut Mulyana (2002:5) mengungkapkan bahwa:

Setiap kelompok orang, terutama kelompok rujukan (reference group), seperti kelompok sebaya (peer group), kelompok keagamaan dan jenis-jenis kelompok lainnya mempunyai perspektif masing-masing”. Perspektif tersebut muncul berdasarkan komunikasi antaranggota kelompok selama mereka menjadi bagian dari kelompok yang bersangkutan. Sesama anggota kelompok bertukar perspektif yang selanjutnya dipergunakan bagi penafsiran realitas apapun yang mereka temui dalam kehidupan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Becker *et al.* (dalam Mulyana, 2002:5) mengungkapkan bahwa:

Perspektif mengandung definisi situasi, seperangkat gagasan yang melukiskan karakter situasi yang memungkinkan pengambilan tindakan. Dengan demikian, sikap individu cenderung akan mencerminkan kepercayaan/ keyakinan, nilai-nilai, dan norma-norma kelompoknya.

Demikian pula halnya dengan kelompok-kelompok etnis. Sebagaimana dijelaskan oleh David Riesman dari Universitas Harvard (dalam Krech *et al.*, 1962:192) bahwa “sikap individu dipengaruhi oleh individu lainnya yang berada dalam satu kelompok dengan individu yang bersangkutan”. Selanjutnya Krech *et al.* (1962:199) mengemukakan bahwa “Sikap individu mencerminkan kepribadian individu yang bersangkutan”. Sikap merupakan pencerminan dari kepribadian, namun sikap tidak selalu berkorelasi dengan kepribadian. Kepribadian merupakan lapisan paling dalam dari individu.

2.5 Pandangan Teori Akomodasi dalam Komunikasi Antaretnis

Jika suatu interaksi kita cermati secara seksama, maka kita akan memperhatikan bahwa pembicara seringkali menyesuaikan perilakunya satu sama lain. Salah satu teori yang berkaitan dengan upaya-upaya penyesuaian dalam suatu interaksi adalah teori akomodasi yang disusun oleh Howard Giles (Littlejohn, 1996:112). Para peneliti akomodasi telah menemukan bahwa akomodasi menjadi penting dalam komunikasi. Ia dapat membawa kepada identitas sosial dan dapat mengikat ketidaksetujuan dan jarak sosial dalam suatu masyarakat. “Akomodasi biasa disebut dengan penyesuaian, yaitu suatu keadaan atau proses manakala kelompok-kelompok yang bertentangan satu sama lainnya sepakat guna menghentikan pertentangan melalui suatu interaksi” (Garna, 1996:153). Dikemukakan oleh Purwasito (2003:84), “akomodasi adalah suatu proses penyesuaian untuk meredakan pertentangan dan perbedaan yang tumbuh melalui proses penyesuaian diri (adaptasi)”.

Titik berat dari akomodasi ialah proses kerja sama dan toleransi yang memperlihatkan warga masyarakat tidak atau belum kehilangan identitas masing-masing kelompok (Garna, 1996:53). Setiap individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat digerakkan dan dirangsang oleh apa yang menjadi kepentingan mereka. Dalam memenuhi setiap kepentingan baik individu maupun kelompok dapat melahirkan dua kemungkinan, yakni adanya kerja sama antarindividu maupun antarkelompok dan adanya persaingan dalam memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Menurut Pareto (dalam Veerger, 1986:80), “kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan sendiri sering melahirkan perilaku yang khas”. Persaingan yang didasarkan atas ego (baik ego pribadi maupun ego kelompok), keserakahan, ambisi, haus akan kekuasaan tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan pertentangan, baik

antarindividu maupun antarkelompok. Pertentangan antarindividu maupun antarkelompok merupakan sumber potensial bagi tercetusnya suatu konflik. Deutsch yang mengembangkan teori kerja sama (*Cooperation*) dan persaingan (*Competition*) mengemukakan:

Dalam situasi persaingan, jika individu maupun kelompok sudah memasuki wilayah tujuan, maka individu atau kelompok yang lain tidak akan bisa mencapai wilayah tujuan mereka masing-masing. Dalam kondisi demikian, ada kecenderungan antarindividu atau antarkelompok akan saling menghambat dalam pencapaian tujuan mereka. Sedangkan dalam situasi kerja sama, individu atau kelompok akan saling menunjang dengan individu atau kelompok lainnya dalam upaya mencapai tujuan mereka. Anggota-anggota dalam kelompok kerja sama akan lebih banyak saling tolong menolong daripada anggota-anggota kelompok persaingan. Penyesuaian (*adaptasi*) lebih dapat terjadi dalam situasi kerja sama daripada dalam situasi persaingan (Sarwono, 1991:83-85)

Dalam memenuhi kepentingan individu maupun kelompok etnis, sikap saling menghambat tidak akan terjadi jika ada sikap toleransi di antara mereka, yakni suatu sikap saling menghormati dan menghargai dengan tidak memaksakan kehendak atau pandangan-pandangannya terhadap individu atau kelompok lainnya. Selain itu melalui kerja sama baik, antarindividu maupun antarkelompok dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, adaptasi (*penyesuaian*) antarindividu maupun antarkelompok lebih dapat dilakukan sehingga akomodasi berbagai kepentingan kelompok lebih dapat dilakukan oleh masing-masing kelompok sebagai upaya meminimalisasi terjadinya konflik.

2.6 Peran Komunikasi Interpersonal dalam Komunikasi Antaretnis

“Komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di sekelompok kecil orang dengan beberapa efek atau umpan balik seketika” (Devito, 1997:4). Dijelaskan oleh Susanto (1977:92) bahwa “Komunikasi interpersonal merupakan usaha untuk mengadakan hubungan sosial. Hubungan sosial ini dilakukan karena seseorang merasa harga dirinya atau rasa amannya akan bertambah, dan hubungan ini akan direalisasikan dengan melakukan komunikasi yang harmonis”. Sebagaimana dikemukakan oleh Johanessen (1996:148), “etika yang secara khas muncul dalam suasana komunikasi interpersonal yaitu keterusterangan, keharmonisan sosial, ketepatan, kecurangan, konsistensi kata dan tindakan, menjaga kepercayaan, dan menghalangi komunikasi”.

Dalam komunikasi interpersonal terkandung suatu hubungan antarindividu yang sedang melakukan komunikasi. “Hubungan adalah sekumpulan harapan yang dimiliki oleh dua orang bagi perilaku mereka” (Littlejohn, 1996:250). Hubungan dihasilkan dari interaksi; sebagai contoh interaksi antartetangga mungkin berubah menjadi sebuah hubungan yang sejajar dan sopan atau mungkin juga sebaliknya. Ada banyak sekali aturan yang implisit di dalam setiap hubungan yang sedang berjalan, baik itu hubungan persahabatan, bisnis, keluarga, ataupun bentuk-bentuk hubungan lainnya.

2.7 Peran Komunikasi Kelompok dalam Komunikasi Antaretnis

“Kelompok dapat dibedakan atas kelompok psikologis dan organisasi sosial” (Krech et al, 1962:383). Kelompok psikologis merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang saling bergantung dan memiliki ideologi tertentu. Kelompok etnis termasuk ke dalam kelompok ini. Kelompok-kelompok

psikologis berhubungan secara fungsional dengan kelompok-kelompok lainnya membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan suatu sistem kelompok-kelompok psikologis yang saling berhubungan secara terpadu, dibentuk untuk melaksanakan suatu tujuan tertentu.

Hasil dari suatu kelompok sangat bergantung kepada sifat interaksi di dalam kelompok itu (Littlejohn, 1996:288), ini merupakan pandangan tradisi interaksional. Dalam masyarakat yang di dalamnya terdiri dari berbagai kelompok etnis yang berbeda, tidak tertutup kemungkinan muncul berbagai pertentangan sebagai akibat dari persaingan kepentingan antarkelompok yang dapat menimbulkan suatu ketegangan dalam diri seseorang manakala ia menduduki peran sebagai individu yang harus saling menghormati satu sama lain sebagai anggota masyarakat. Pada sisi lain ia sebagai bagian dari kelompoknya yang harus setia satu sama lainnya untuk memenuhi kebutuhan baik sebagai individu maupun kelompok. Ketika ketegangan-ketegangan individu terakumulasi ke dalam kelompoknya, hal demikian akan menjadikan ketegangan antarkelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Ketegangan yang muncul di antara pihak-pihak yang bertentangan dalam suatu masyarakat menuntut suatu penyelesaian. Untuk itu, diperlukan adanya tindakan-tindakan yang dapat mengakomodasi ketegangan-ketegangan yang muncul. Beberapa jenis persetujuan bersama (konsensus) mengenai wujud kewajiban-kewajiban sosial sangat penting untuk diperhatikan. Begitu juga mengenai adanya kekuatan yang mampu memaksa orang-orang untuk melaksanakan kewajiban tersebut, minimal diperlukan untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. Lantas bagaimana persetujuan tersebut dapat dicapai? Kemudian, kekuatan apakah yang cukup mampu untuk membujuk orang-orang dan pihak-pihak itu untuk mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi terpenuhinya kepentingan masyarakat secara keseluruhan? Sebagaimana dikemukakan oleh Nottingham, (1997:36-37) bahwa:

Apabila masyarakat diharapkan tetap stabil, dan tingkah laku sosial masyarakat bisa tertib dan baik, maka tingkah laku yang baik harus ditata dan dipolakan sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu yang relatif diterima dan disepakati bersama. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan tujuan-tujuan atau merupakan sasaran tingkah laku sosial manusia. Tujuan-tujuan semacam itu pada umumnya disebut sebagai nilai-nilai. Pada saat nilai-nilai suatu masyarakat dapat diintegrasikan dalam suatu tatanan atau sistem yang berarti, pada saat itulah anggota-anggota masyarakat dapat bersatu menuju ke satu arah dalam tingkah laku mereka.

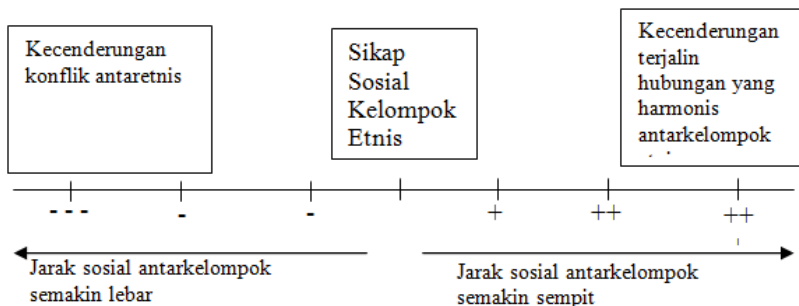
BAB 3

SIKAP SOSIAL DALAM KOMUNIKASI ANTARETNIS

3.1 Hakikat dan Obyek Sikap Sosial

Dalam setiap proses komunikasi, baik komunikasi antarindividu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi akan memiliki sikap terhadap suatu obyek. “Sikap merupakan produk dari proses sosialisasi dimana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya” (Mar’at, 1981:9). Sejalan dengan pendapat tersebut, Krech *at.al.* (1962:139) mengungkapkan bahwa “sikap merupakan suatu sistem yang menetap tentang penilaian baik positif maupun negatif, perasaan emosi, kecenderungan pro atau kontra terhadap obyek-obyek sosial”. Sebagaimana dikemukakan Newcomb *at.al.* (1985:77), “Sikap-sikap positif mencenderungkan orang kepada semacam pendekatan terhadap obyek, sedangkan sikap negatif mencenderungkan penghindaran terhadap obyek”. Sikap permusuhan (negatif) yang semakin mendalam, mengakibatkan jarak sosial antarkelompok yang bermusuhan semakin jauh. Jarak sosial yang semakin jauh, menyebabkan saluran-saluran komunikasi antarkelompok yang bersitegang semakin terhambat.

Sebaliknya, sikap persahabatan (positif), akan mempersempit jarak sosial antarkelompok. Dengan mempersempit jarak sosial saluran-saluran komunikasi antarkelompok akan lebih terbuka. Hal demikian akan membentuk hubungan yang harmonis antarkelompok (etnis). Pola hubungan antara sikap sosial dan jarak sosial dalam komunikasi antaretnis dapat diilustrasikan dalam gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Pola hubungan sikap sosial dan jarak sosial dalam komunikasi antaretnis.

Sikap sosial merupakan organisasi dan kognisi-kognisi yang mempunyai valensi. Berdasarkan penelitian Angus Campbell (Krech *at.al.*, 1962:138), seseorang mempunyai kepercayaan tentang suatu obyek pembicaraan. Kepercayaan tersebut akan berhubungan dengan perasaan tentang obyek. Kepercayaan dan perasaan orang yang bersangkutan selanjutnya dihubungkan dengan tingkah laku. Dengan demikian, sikap seseorang terhadap suatu obyek ditentukan oleh kepercayaan, perasaan, dan kecenderungan merespon obyek. Dalam prosesnya, ketiga komponen tersebut saling berhubungan dalam membentuk suatu sistem yang disebut sikap terhadap obyek. Mar'at (1981:14) mengatakan “interaksi antara ketiga komponen tersebut menghasilkan *total attitude*”. Dalam hal ini Mar'at (1981:12) menjelaskan bahwa “sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap obyek pada lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap obyek tersebut”. Berdasarkan uraian di atas, setiap sikap akan memiliki obyek. “Obyek sikap adalah segala

sesuatu yang ada pada diri individu” (Krech *at.al.*, 1962:140). Individu memiliki sederetan sikap terhadap obyek-obyek dalam dunia fisik yang mengelilinginya, dunia sosial, orang lain, kelompok organisasi sosial, politik, dan ekonomi. Dalam hubungannya dengan komunikasi antaretnis, sikap individu merupakan refleksi atas pemahaman kelompok etnisnya. Sikapnya dalam merespon suatu obyek akan terpaut dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok etnisnya. Semakin dalam pemahaman tentang nilai-nilai yang dianutnya, semakin tercermin dalam sikapnya dan akan lebih dinyatakan dalam tindakan-tindakannya.

3.2 Komponen Sikap Sosial

Ada tiga komponen sikap; yakni “kognitif, afektif, dan kecenderungan bertindak” (Krech *at.al.*, 1962:140). Sejalan dengan pemikiran tersebut, Mar’at (1981:13) mengemukakan komponen sikap sebagai berikut: ”1) Komponen kognisi, yang berhubungan dengan *belief*, ide, dan konsep; 2) Komponen afeksi, yang menyangkut kehidupan emosional seseorang; 3) komponen konasi, yang merupakan kecenderungan bertingkah laku”.

“Komponen kognitif adalah kepercayaan seseorang terhadap obyek sikap” (Krech *at.al.*, 1962:140). Sikap individu ataupun kelompok etnis tentang toleransi akan terpaut dengan pengertian nilai dan norma budaya, saling menghormati antarkelompok etnis, saling percaya-mempercayai, dan adanya kerja sama antkelompok etnis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. “Komponen afektif menunjuk kepada emosi seseorang terhadap suatu obyek” (Krech *at.al.*, 1962:140). “Sikap merupakan kumpulan dari berpikir, keyakinan, dan pengetahuan. Namun disamping itu memiliki evaluasi negatif maupun positif yang bersifat emosional yang disebabkan oleh komponen afektif”, (Mar’at, 1981:14) .

Pengetahuan dan perasaan yang merupakan kluster dari sikap akan menghasilkan tingkah laku tertentu. Obyek sikap yang dihadapi akan berhubungan langsung dengan pemikiran dan penalaran seseorang, sehingga komponen kognisi dapat melukiskan obyek tersebut. Hal ini berarti adanya penalaran pada diri seseorang terhadap obyek mengenai karakteristik obyek yang bersangkutan. Misalnya, seseorang melihat adanya kerja sama antarkelompok etnis dalam suatu kegiatan pembangunan di pedesaan. Kegiatan tersebut akan masuk dalam kognisinya dan sekaligus akan menggambarkan hal-hal yang bermanfaat dari kerja sama antarkelompok etnis dalam pembangunan pedesaan. Dari kejadian tersebut, individu yang bersangkutan akan memiliki penilaian yang positif terhadap kerja sama antarkelompok etnis. Penilaian positif atau negatif terhadap suatu obyek merupakan penilaian emosional yang termasuk kedalam komponen afektif. Sikap emosional terhadap suatu obyek tertentu akan menimbulkan rasa senang atau tidak senang, suka atau tidak suka. “Karenanya, manusia pada tingkat kecerdasan yang rendah, kurang memiliki aspek penalaran yang baik, dan dalam evaluasi emosionalnya pun kurang adanya kehalusan sehingga mengakibatkan kecenderungan tingkah laku yang kurang serasi (kasar)” (Mar’at, 1981:14). Dalam hal membangun kebersamaan antarkelompok etnis dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, jika seseorang memiliki pengetahuan yang memadai tentang nilai dan norma budaya dan memandang positif tentang kerukunan hidup antarkelompok etnis maka kecenderungan tindaknya adalah mampu mengendalikan diri, sehingga tidak mudah terpancing oleh hal-hal yang dapat menimbulkan konflik antaretnis, menegakkan moral budaya sebagai landasan berpijak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, menumbuhkan rasa toleransi antarkelompok etnis, dan menumbuhkan tanggung jawab bersama tentang pentingnya kerukunan hidup bersama.

Komponen kecenderungan bertindak adalah kecenderungan-kecenderungan tindak seseorang baik positif maupun negatif terhadap suatu obyek sikap. Sikap positif membuat seseorang akan membantu atau menolong, maupun menyokong obyek sikap. Sedangkan sikap negatif berarti akan berusaha menghindar, menghancurkan, ataupun merusak obyek sikap. Dalam hal demikian, jika seseorang menyenangkan orang lain, maka kecenderungan tindaknya adalah bersahabat dan bergaul dengannya. Sebaliknya, jika tidak menyenangkan maka kecenderungan tindaknya adalah menghindari untuk bergaul.

3.3 Pembentukan dan Perubahan Sikap Sosial

Masalah pembentukan sikap tidak hanya penting bagi ilmu sosial saja; termasuk di dalamnya ilmu komunikasi, melainkan penting juga bagi orang-orang yang ingin mempelajari bagaimana mengembangkan sikap, melemahkan atau menguatkan sikap; baik sikap individu maupun sikap kelompok terhadap suatu obyek tertentu. Selain itu, pembentukan sikap penting dipelajari untuk memahami bagaimana meniadakan dan menghapuskan sikap-sikap tertentu; misalnya sikap apriori, prasangka sosial, ataupun sikap diskriminasi. Mar'at (1981:26), mengungkapkan, “kegunaan dari mempelajari perubahan sikap dapat dipakai untuk psikoterapi, pendidikan, propaganda, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari”. Adapun faktor-faktor yang dapat menentukan pembentukan sikap sebagaimana dikemukakan Krech *at.al.* (1962:180) adalah “keinginan individu, informasi yang diperoleh, afiliasi kelompok, dan kepribadian”.

3.3.1 Sikap Dibentuk oleh Keinginan

“Keinginan adalah hasil dari keadaan fisik seseorang dan interaksinya dengan obyek-obyek yang lain” (Krech *at.al.*, 1962:181). Dalam menghadapi berbagai situasi lingkungan guna memenuhi keinginannya, individu selalu berupaya untuk mengembangkan sikap-sikapnya. Pengembangan sikap tersebut menuju ke arah yang menguntungkan individu maupun kelompok yang bersangkutan terhadap suatu obyek yang dapat memenuhi keinginannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Milton J. Rosenberg (dalam Krech *at.al.* (1962:181) tentang bentuk intensitas perasaan individu terhadap obyek yang berhubungan dengan alat dan kepercayaan terhadap alat yang bernilai untuk membantu mencapai atau menghambat pencapaian tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tanda-tanda intensitas perasaan yang ditentukan oleh kepuasan yang diperoleh individu. Hasil analisis data menunjukkan bahwa tanda-tanda dan intensitas perasaan terhadap kebebasan berbicara kaum komunis dengan publik, memiliki hubungan yang signifikan dengan keyakinan akan nilai-nilai instrumental untuk mencapai tujuan yang penting bagi setiap individu.

3.3.2 Sikap Dibentuk oleh Informasi yang Diperoleh

“Informasi yang diperoleh individu ataupun kelompok dapat membentuk atau menentukan sikap individu atau kelompok yang bersangkutan. Informasi yang menyebabkan terbentuknya sikap akan berhubungan dengan sikap-sikap yang lainnya” (Krech *at.al.*, 1962:186). Sebagai contoh, sekelompok orang yang kurang mempunyai pengetahuan tentang perang kimia dan biologi, tidak akan mempunyai sikap tentang hal tersebut. Namun setelah membaca dan memperoleh informasi tentang jenis perang baru dengan menggunakan senjata gas beracun dengan berbagai akibatnya, maka timbullah sikap negatif mereka terhadap jenis

persenjataan tersebut, dan kecenderungan bertindakya adalah mereka mengusulkan perlucutan senjata. Demikian pula halnya dalam kerukunan hidup antarkelompok etnis dan kelompok keagamaan, “dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama menyebabkan mereka kurang memiliki sikap toleransi keagamaan” (Hasyim, 1979:1337). Namun setelah mereka memperoleh informasi bahkan mengalaminya sendiri konflik dan kerusuhan antaretnis sebagaimana halnya yang pernah terjadi di Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dan di beberapa daerah lainnya, maka mereka akan memiliki sikap betapa pentingnya toleransi dalam membangun kebersamaan antarkelompok etnis. Kecenderungan bertindakya adalah mereka berupaya menciptakan sikap-sikap yang toleran guna mewujudkan kerukunan hidup bersama dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Informasi baru yang diperoleh sering membentuk sikap jika terdapat kesesuaian dengan sikap-sikap yang sudah ada. Julian O. Morrisette dari Universitas Michigan (Krech *at.al.*, 1962:187) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa 91% responden menjawab menyukai teman yang belum dikenalnya hanya berdasarkan pada informasi dari temannya yang dapat menimbulkan rasa simpati. Hal ini sejalan dengan teori keseimbangan dari Heider (Mar’at, 1981:37), yang telah mengembangkan konsep mengenai “hubungan antarindividu beserta lingkungannya. Hubungan tersebut merupakan interaksi dari subyek-subyek yang menentukan sikap”. Lebih lanjut Mar’at (1981:104) mengungkapkan:

Teori keseimbangan Heider lebih menitikberatkan pada unsur keseimbangan yang merupakan faktor utama untuk mengevaluasi keberhasilan perubahan sikap. Pemikiran yang diajukan pada teori ini adalah bahwa suatu sikap tidak relevan dengan apa yang diinginkan oleh pihak pertama. Hal ini dinyatakan dalam ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan; untuk mencapai ini maka dengan cara-cara persuasi atau komunikasi diadakan re-evaluasi mengenai persepsi yang

telah dibuat terlebih dahulu. Dalam hal ini terlihat bahwa ketidakseimbangan itu banyak ditentukan oleh faktor senang dan tidak senang. Disamping itu pola kesatuan hubungan seringkali ditentukan oleh faktor emosional; sehingga teori keseimbangan ini banyak ditentukan oleh komponen afeksi. Sedangkan perubahan sikap dilakukan melalui struktur kognisi.

Sikap manusia yang validitasnya kurang disebabkan oleh informasi yang tidak cukup menggambarkan fakta yang benar. Kurangnya pengetahuan tentang fakta-fakta dapat menimbulkan interpretasi yang keliru tentang suatu obyek. Kesalahan informasi ini dapat menimbulkan prasangka (Krech *at.al.*, 1962:188). Kebenaran fakta sangat erat hubungannya dengan sumber data. Sumber data dapat diklasifikasikan atas tiga jenis; yakni 1) otoritas; 2) Penciptaan, penemuan, dan distorsi fakta; 3) Penampilan dan realita (Krech *at.al.*, 1962:189).

Pada umumnya sulit diperoleh fakta yang penting langsung dari sumbernya. Ketidakbenaran fakta tergantung dari sumber data karena pihak otoriter dapat saja membuat kesalahan atau bahkan dengan sengaja melakukan penyimpangan terhadap fakta yang disampaikan. Namun demikian dalam menerima informasi, individu yang bersangkutan tidak akan menerima begitu saja; melainkan berkecenderungan melakukan penyaringan terlebih dahulu terhadap informasi yang diterimanya untuk menentukan pilihan selanjutnya.

“Ketidakseimbangan kognisi akan cenderung mengubah arah peningkatan harmoni dan kesesuaian. Prinsip kesesuaian ini berlaku juga dalam pembentukan sikap” (Krech *at.al.*, 1962:189). Kurangnya fakta yang relevan dan adanya fakta yang bertentangan akan menyebabkan individu yang bersangkutan menciptakan, menemukan atau bahkan mengubah fakta yang menunjang dan identik dengan sikap yang telah ada.

Adanya otoritas yang kurang dipercaya menyebabkan sipenerima informasi lebih mempercayai apa yang dilihat tentang penampilan pihak pemilik otoritas. Namun demikian, penerima informasi harus berhati-hati dalam menerima penampilan sebagai bahan informasi; sebab mungkin saja penampilan seseorang dibuat-buat (tidak apa adanya) sehingga penampilan tersebut adalah penampilan semu belaka (penampilan yang tidak sesungguhnya).

3.3.3 Sikap Dibentuk oleh Afiliasi Kelompok

Sikap individu cenderung mencerminkan kepercayaan, nilai-nilai, dan norma-norma kelompoknya (Krech *at.al.*, 1962:191). Daniel E. Hebding dan Leonard Glick (dalam Liliweri, 2003:56), mengemukakan “*belief* (kepercayaan) dapat diartikan sebagai gagasan yang dimiliki oleh orang tentang sebagian atau keseluruhan realitas dunia yang mengelilingi dia”. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa subyek dari kepercayaan manusia tidak terhingga dan meliputi gagasan tentang individu, orang lain, semua aspek biologis, fisik, sosial, maupun dunia supranatural. Sedangkan nilai merupakan standar untuk menentukan sesuatu itu baik atau tidak baik tentang suatu obyek, peristiwa, tindakan atau kondisi. Norma lebih mengacu kepada standar perilaku kelompok. Norma kelompok tidak hanya menentukan perbuatan apa yang benar tetapi juga menentukan sikap apa yang benar.

Sudah menjadi suatu hal yang umum bahwa anggota-anggota dalam suatu kelompok kebudayaan tertentu mempunyai suatu sikap yang sejenis tentang kepercayaannya terhadap suatu obyek, manusia, kejadian-kejadian, persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan, dan sebagainya. Sehubungan dengan hal tersebut, Daniel Katz dan Kenneth W. Braly (Krech *at.al.*, 1962:194) pada tahun 1932 meminta 100 orang mahasiswa Princeton mengemukakan lima karakter yang mereka anggap paling berperan dari kelompok-kelompok etnik yang berbeda.

Hal yang sama dilakukan oleh G.M. Gilbert pada tahun 1950 terhadap 333 mahasiswa Princeton. Hasil dari kedua studi tersebut menunjukkan bahwa anggota-anggota dalam suatu kelompok cenderung menunjukkan kepercayaan yang sama terhadap suatu obyek dan kejadian

3.3.4 Sikap Mencerminkan Kepribadian

Sikap merupakan pencerminan dari kepribadian. Namun sikap tidak selalu berkorelasi dengan kepribadian. Kepribadian merupakan lapisan yang paling dalam dari individu. Sesudah lapisan ini terdapat lapisan penampilan. Penampilan merupakan tingkah laku yang dapat diobservasi. Dalam hubungannya dengan kesukuan (ras), Titus dan Holander (dalam Krech *at.al.*, 1962:205) mengemukakan bahwa “sikap kesukuan dapat merupakan ekspresi yang dalam dari kecenderungan kepribadian”. Pernyataan tersebut lebih diperhalus oleh Howard P. Smit dan Ellen W. Rosen (Krech *at.al.*, 1962:207) bahwa “dimensi kebersamaan berhubungan erat dengan dimensi autoritarian dan sulit untuk mempertimbangkannya sebagai aspek perbedaan yang tajam dari struktur kepribadian yang sama”. Kepribadian dalam hubungannya dengan sikap politik dikemukakan oleh Mc. Closky (1958) (Krech *at.al.*, 1962:205-210) tentang orang-orang yang beraliran konservatif dan liberal di Amerika. Hasil penelitian Mc. Closky menunjukkan sikap konservatif cenderung ditandai dengan kekurangan informasi pendidikan dan intelegensi. Kaum ekstrim konservatif memiliki sifat-sifat suka bermusuhan, percaya tahayul, kaku, cepat menyalahkan orang lain karena kelemahan dan kegagalannya, sangat tidak toleran, mudah mencemooh yang lain, tidak luwes dalam memberikan pertimbangan, dan sifat negatif lainnya yang diperkirakan disebabkan oleh perbedaan pendidikan dan status antara kaum konservatif dan kaum liberal. Hubungan antara sikap konservatif dengan kepribadian tidaklah terlalu meyakinkan karena hanya

pandangan politik belaka, tetapi disebabkan banyak faktor yang dialami dan diinginkan oleh kaum konservatif.

3.4 Sikap Sosial dalam Komunikasi Antarindividu

Komunikasi interpersonal merupakan usaha untuk mengadakan hubungan sosial. "Hubungan sosial ini dilakukan karena seseorang merasa harga dirinya atau rasa amannya akan bertambah, dan hubungan ini akan direalisasikan dengan melakukan komunikasi yang harmonis" (Susanto 1977:92). Dalam komunikasi antarpribadi, pembicaraan dilakukan dengan bertatap muka langsung. Karenanya perlu ada kedekatan fisik. Melalui komunikasi jenis ini segala kekeliruan dan kesalahpahaman dapat segera diatasi.

Tujuan utama mempelajari komunikasi antarbudaya adalah membangun saling pengertian antarindividu atau kelompok dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan kata lain melalui pengkajian komunikasi antarbudaya dapat mengurangi kesalahpahaman dalam proses dan tindak komunikasi. Demikian pula halnya dengan komunikasi antaretnis, melalui pengkajian komunikasi antaretnis diharapkan dapat membentuk saling pengertian sebagai landasan dalam mewujudkan kerukunan hidup antarkelompok etnis. Dalam perspektif tersebut, komunikasi interpersonal (antarindividu) merupakan unit analisisnya, terutama dalam upaya membangun kerja sama antarkelompok dengan latar budaya yang berbeda.

"Komunikasi antarpribadi (antarindividu) merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan para pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun nonverbal" (Mulyana, 2002:73). Berdasarkan pendapat tersebut, komunikasi antarindividu ditandai oleh adanya kedekatan jarak yang memungkinkan orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi bertatap muka secara langsung sehingga kekeliruan

atau kesalahpahaman lebih memungkinkan untuk dikoreksi secara langsung.

Berdasarkan pada beberapa hal sebagaimana dikemukakan di atas, komunikasi antarindividu dilakukan untuk dapat lebih meyakinkan dan membentuk pemahaman bersama tentang pokok pembicaraan, Hal tersebut menunjukkan adanya ketergantungan kepada orang lain dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh DeVito (1997:231), “Komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di sekelompok kecil orang dengan beberapa efek atau umpan balik seketika”. Melalui komunikasi interpersonal, berbagai hambatan dan permasalahan yang ditemui dapat segera diatasi, karena dalam proses komunikasi interpersonal terjadi hubungan secara langsung serta adanya kedekatan dan keterusterangan antara orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi.

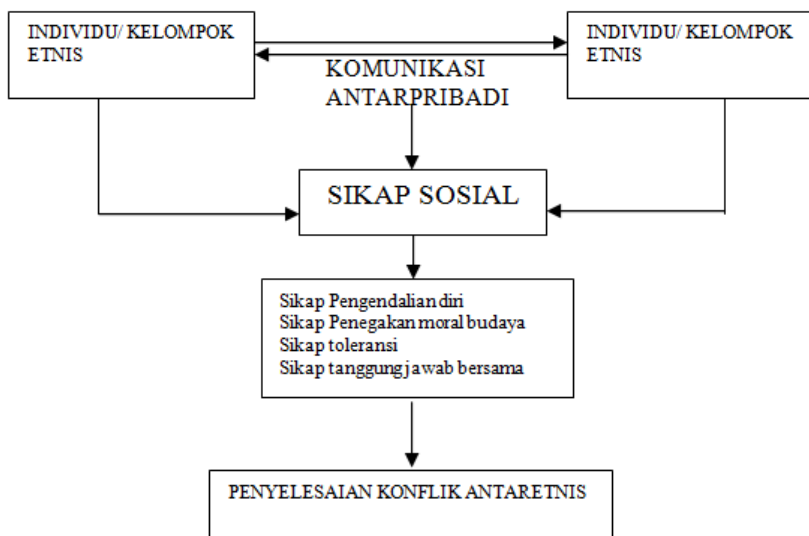
Dalam setiap proses komunikasi, baik komunikasi antarindividu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok, setiap individu yang terlibat dalam proses komunikasi akan memiliki sikap terhadap suatu obyek. “Sikap merupakan produk dari proses sosialisasi dimana seseorang bereaksi sesuai dengan rangsangan yang diterimanya” (Mar’at, 1981:9). Krech *at.al.* (1962:139) mengungkapkan bahwa “sikap merupakan suatu sistem yang menetap tentang penilaian baik positif maupun negatif, perasaan emosi, kecenderungan pro atau kontra terhadap obyek-obyek sosial”. Sehubungan dengan kerukunan hidup antaretnis, berbagai sikap dan perilaku yang dapat merusak sendi-sendi keharmonisan antaretnis akan lebih efektif dilakukan melalui jenis komunikasi interpersonal. Sebagaimana dikemukakan Krech *at.al.* (1962:180) faktor-faktor yang dapat menentukan pembentukan sikap adalah “keinginan individu, informasi yang diperoleh, afiliasi kelompok, dan kepribadian”. Dalam komunikasi antakelompok etnis, akan terbentuk komunikasi yang harmonis jika masing-masing pihak

mengembangkan sikap kemampuan mengendalikan diri dan saling menganyomi antarsesama mereka, menegakkan moral agama sebagai landasan berpijak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, menumbuhkan sikap tolerans, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab bersama tentang pentingnya kerukunan hidup bersama.

Sikap kemampuan mengendalikan diri merupakan ekspresi dari kepribadian. Kepribadian merupakan lapisan yang paling dalam dari individu. Sesudah lapisan ini terdapat lapisan penampilan yang merupakan tingkah laku yang dapat diobservasi. Sikap pengendalian diri yang dimiliki oleh individu ini diekspresikan ke dalam perilaku-perilaku yang bersangkutan untuk menghindarkan diri dari konflik baik antarindividu, maupun antarkelompok etnis. Melalui sikap pengendalian diri, masing-masing pihak lebih cenderung untuk lebih mengendalikan emosi dan ego mereka untuk mencari alternatif-alternatif penyelesaian dari permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi sehingga konflik antarkelompok etnis dapat dihindarkan.

Littlejohn, (1996:250) mengungkapkan: “Di dalam komunikasi interpersonal terkandung suatu hubungan antarindividu yang sedang melakukan komunikasi. Hubungan adalah sekumpulan harapan yang dimiliki oleh dua orang bagi perilaku mereka”. Komunikasi antarindividu dengan latar belakang etnis yang berbeda dilakukan untuk dapat lebih meyakinkan dan membentuk pemahaman bersama tentang pokok pembicaraan,. Hal tersebut menunjukkan bahwa “informasi yang diperoleh individu ataupun kelompok dapat membentuk atau menentukan sikap individu atau kelompok yang bersangkutan.” (Krech *at.al.*, 1962:186). Dilihat dari sisi permukaan, secara umum hubungan antaretnis kemungkinan dapat terlihat baik, terutama dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun dalam hal itu, tidak berarti tidak ada masalah sama sekali dalam hubungan antaretnis. Melalui komunikasi antarpribadi berbagai masalah antaretnis yang muncul dapat segera diredam sebelum memberikan dampak

negatif yang dapat merusak sendi-sendi kerukunan antaretnis. Dalam hal demikian sikap kemampuan mengendalikan diri, menegakkan moral dan nilai-nilai budaya sebagai landasan berpijak dalam kehidupan sosial kemaasyarakatkan, menumbuhkan sikap toleransi, dan menumbuhkan sikap tanggung jawab bersama tentang pentingnya kerukunan hidup merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh masing-masing kelompok etnis. Berdasarkan uraian di atas, sikap-sikap sosial dalam komunikasi antaretnis di lokasi penelitian sebagai landasan bagi terbentuknya kerukunan hidup antaretnis dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Sikap sosial dalam komunikasi antarpribadi sebagai landasan bagi penyelesaian konflik antaretnis

3.5 Sikap Sosial dalam Komunikasi Kelompok

Komunikasi kelompok dilakukan untuk membahas berbagai kepentingan bersama yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok. Selain itu, komunikasi kelompok juga dilakukan untuk menyusun rencana-rencana kerja yang akan dilakukan oleh masyarakat. Melalui komunikasi kelompok, dapat diperoleh berbagai informasi tentang berbagai peristiwa dan rencana kerja untuk kepentingan bersama. Komunikasi kelompok dapat dilaksanakan di balai pertemuan desa atau di rumah salah seorang warga masyarakat tergantung pada tujuannya.

Kepentingan yang berhubungan dengan pembangunan desa secara formal dimusyawarahkan di balai pertemuan desa. Dalam musyawarah ini langsung dipimpin oleh kepala desa dan dihadiri oleh para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh pemuda yang mewakili kelompok (dari setiap dusun /kampung) mereka masing-masing. Dalam acara ini beberapa hal yang dibahas yakni mengevaluasi hasil kerja yang telah dilaksanakan, merencanakan pembangunan desa berikutnya, dan menentukan sumber dana. Setiap peserta diskusi yang merupakan perwakilan kelompoknya masing-masing dengan tanpa membedakan etnis diberikan kesempatan untuk mengemukakan pikiran, kehendak, ide, dan persoalan-persoalan yang dihadapi sehubungan dengan pembangunan masyarakat desa. Komunikasi kelompok merupakan bagian dari keseharian mereka. Melalui komunikasi kelompok ini mereka saling bertukar pengalaman dan bertukar informasi dan mereka merasakan banyak sekali memperoleh manfaat dari hal tersebut, dalam hal demikian komunikasi kelompok tetap merupakan rujukan bagi alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam keseharian mereka.

Suatu kelompok dapat diwujudkan karena adanya kesamaan tujuan yang hendak dicapai oleh para anggotanya. Melalui kegiatan kelompok, para anggotanya merasakan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya dapat terlaksana. Sejalan dengan

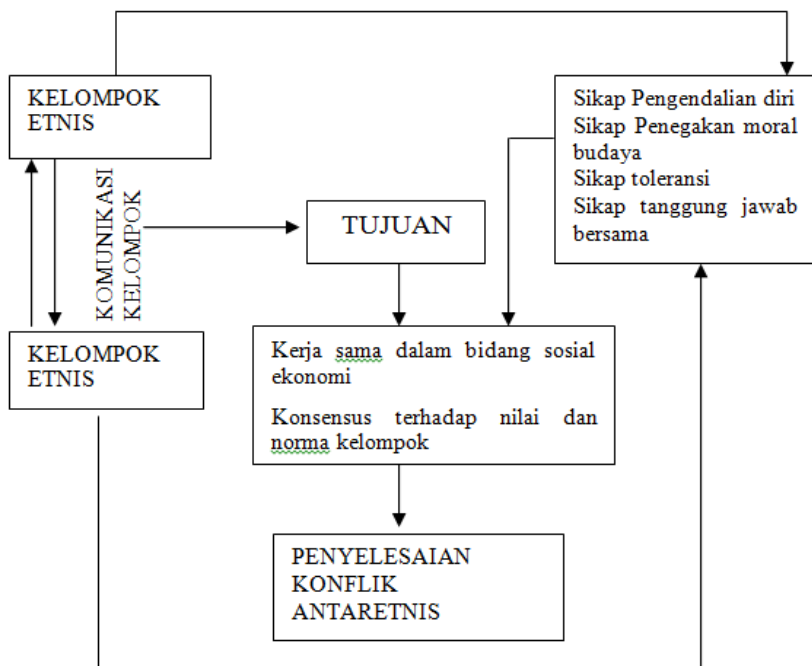
hal tersebut, Mulyana (2002:74) mengemukakan, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut.

Dalam kelompok etnis, tujuan yang ingin dicapai oleh para anggotanya didasari oleh nilai-nilai budaya sesuai dengan, suatu nilai budaya yang berisikan penjelasan-penjelasan dan petunjuk-petunjuk untuk memahami berbagai persoalan dan pengalaman dalam kehidupan mereka.. Komunikasi kelompok dilakukan untuk membahas berbagai kepentingan bersama yang bertujuan untuk mencari jalan keluar atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kelompok. Melalui komunikasi kelompok, dapat diperoleh berbagai informasi tentang berbagai peristiwa dan rencana kerja untuk kepentingan bersama. Hal tersebut menunjukkan adanya suatu bentuk kerja sama antarkelompok etnis dalam bidang sosial kemasyarakatan. Dengan adanya sikap yang menunjukkan kemauan dan kemampuan untuk melakukan kerja sama antarkelompok etnis dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka merupakan cerminan dari sikap saling percaya dalam bidang kerja sama yang mereka jalin. Tanpa adanya saling percaya, kerja sama itu tidak akan pernah ada. Hal demikian merupakan landasan yang kokoh bagi terwujudnya kebersamaan. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Meskipun perbedaan etnis merupakan titik rawan dan hal yang cukup potensial bagi terjadinya konflik, namun selagi kerja sama antarkelompok etnis tersebut tetap terpelihara, dan para anggotanya merasa kebutuhannya terpenuhi, serta merasa diperlakukan secara adil tanpa merasa mendapat perlakuan yang berbeda dalam kerja sama tersebut, dan setiap para anggotanya konsensus untuk tetap mematuhi nilai dan norma yang disepakati bersama, maka kerukunan hidup antarkelompok etnis akan tetap terpelihara dan konflik antaretnis tidak akan pernah terjadi. Sebagaimana dikemukakan Newcomb (1985:297), “Sejauh anggota-

anggota suatu kelompok mempunyai sikap yang sama terhadap suatu obyek, para anggotanya akan berkonsensus mengenai sikap yang bersangkutan”. Karenanya untuk dapat mewujudkan kerja sama antarkelompok etnis dalam bidang sosial kemasyarakatan dan ekonomi pedesaan serta konsensus terhadap nilai dan norma yang disepakati bersama, masing-masing individu dalam kelompok yang bersangkutan harus tetap memiliki sikap kemampuan mengendalikan diri, menegakkan moral dan nilai-nilai budaya sebagai landasan berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, toleransi keagamaan, dan sikap tanggung jawab bersama tentang pentingnya kebersamaan.

Kerja sama antarkelompok etnis dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial kemasyarakatan; seperti halnya dalam rencana pembangunan desa seluruh elemen masyarakat yang mewakili berbagai kelompok yang ada ikut terlibat demi kepentingan bersama. Demikian juga halnya dalam memperingati hari-hari besar nasional, kebersamaan antarkelompok etnis tercermin dalam berbagai kegiatan dan perlombaan yang mereka selenggarakan bersama. Melalui berbagai kegiatan kelompok tersebut, memungkinkan bagi masyarakat untuk melakukan komunikasi kelompok sebagai sarana dalam mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan uraian di atas, pola komunikasi antarkelompok etnis dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 3.3 Pola komunikasi antarkelompok etnis

BAB 4

PERSEPSI DAN PRASANGKA SOSIAL DALAM KOMUNIKASI ANTARETNIS

4.1 Persepsi dalam Komunikasi Antaretnis

“Persepsi merupakan inti dari komunikasi sedangkan penafsiran merupakan inti dari persepsi yang identik dengan penyandian balik dalam proses Komunikasi”. Demikian diungkapkan oleh Mulyana (2002:167) dan Purwasito (2003:172). Devito (1997:75) mengemukakan bahwa “persepsi sangat penting bagi studi komunikasi dalam semua bentuk dan fungsinya”. Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognisi yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungan baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi sosial menyangkut organisasi informasi tentang orang-orang dan pemberian ciri-ciri kepada mereka. John R. Wienburg dan William W. Wilmot menyatakan bahwa persepsi adalah cara memberi makna, sedangkan Rudolph F

Verderber, persepsi adalah menafsirkan informasi inderawi. Menurut J. Cohen, persepsi merupakan interpretasi bermakna atas sensasi sebagai representasi obyek eksternal (Mulyana, 2002:167 dan Purwasito, 2003:172). Menurut Devito (1997:75), “persepsi adalah proses dengan mana kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indera kita”. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pandangan atau pengertian seseorang mengenai suatu obyek yang dibentuk melalui suatu proses kognitif berdasarkan informasi-informasi tentang obyek yang bersangkutan yang diterima baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, maupun penciuman. Dengan demikian, seseorang dalam mempersepsikan suatu obyek akan dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan kehendak atau tujuannya. Apa yang dipersepsikan oleh seseorang merupakan realita informasi yang diterimanya yang akan mempengaruhi responnya terhadap obyek yang dipersepsikannya.

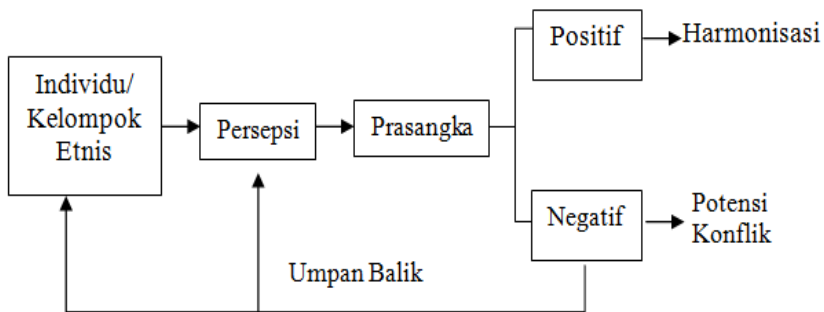
“Persepsi meliputi penginderaan (sensasi) melalui alat-alat indera, atensi, dan interpretasi” (Mulyana, 2002:168). Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken, juga Judy C Pearson dan Paul E. Nelson (dalam Mulyana, 2002:169) menyebutkan bahwa “persepsi terdiri dari tiga aktivitas; yaitu: proses seleksi, pengorganisasian, dan interpretasi yang berjalan secara serempak”. Dalam proses seleksi tercakup proses sensasi dan atensi, sedangkan proses pengorganisasian melekat pada interpretasi, yakni meletakkan suatu rangsangan bersama rangsangan lainnya menjadi suatu keseluruhan yang bermakna. Dalam melakukan aktivitasnya sepanjang hari, setiap manusia banyak sekali menerima rangsangan, namun tidak semua rangsangan yang diterimanya dipersepsikan. Apa yang dipersepsi oleh seseorang akan tergantung pada motivasi dan kebutuhan orang yang bersangkutan.

Persepsi sosial adalah proses menangkap arti obyek-obyek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami dalam lingkungan kita. Manusia bersifat emosional, sehingga penilaian mereka mengandung resiko (Mulyana, 2002:175). “Persepsi sosial seseorang sangat tergantung dari pengalaman, seleksi dan evaluasi orang yang bersangkutan” (Purwasito, 2003: 173). Persepsi tersebut muncul karena setiap penilaian dan seleksi seseorang terhadap orang lain diukur berdasarkan standar budayanya sendiri. Sedangkan budaya asing yang dicurigai berpengaruh negatif sering ditentukan sebagai upaya merusak budayanya sendiri. Kondisi demikian memungkinkan suatu kelompok budaya tertentu, termasuk kelompok keagamaan berusaha untuk melindungi kebudayaannya dari ketergusuran budaya lain yang dianggapnya merusak. Sehubungan dengan hal tersebut, Mulyana (2002:197) mengungkapkan “persepsi itu terikat oleh budaya (*culture-bound*). Bagaimana kita memaknai suatu pesan, obyek, atau lingkungan bergantung pada sistem nilai yang kita anut”. Dengan demikian, dalam komunikasi antaretnis, persepsi seseorang terhadap orang yang berbeda etnis dengannya akan dipengaruhi oleh pengalaman masa lalunya dan penilaiannya tentang kehidupan bersama dengan etnis yang lainnya

Persepsi tentang sesuatu menyangkut proses-proses tansaksional antara siperseptor dengan obyek yang dipersepsinya. Persepsi seseorang atas obyek yang dipersepsinya akan menimbulkan bagaimana sikap orang tersebut terhadap obyek yang dipersepsinya. Sikap demikian merupakan suatu prasangka. Mar’at (1981:113) mengungkapkan bahwa “prasangka merupakan dugaan-dugaan yang memiliki nilai ke arah negatif; namun dapat pula dugaan ini bersifat positif. Tetapi pada umumnya mengarah pada penilaian negatif yang diwarnai oleh perasaan yang muncul sesaat itu”. Prasangka merupakan pernyataan-pernyataan umum yang didasarkan atas beberapa pengalaman dangkal yang tidak teruji. Karenanya, prasangka merupakan penilaian secara emosional dan cenderung menghakimi pihak lain secara negatif.

Dengan demikian, sikap-sikap prasangka terhadap orang lain atau kelompok lain merupakan kecenderungan sikap untuk menjauhi dan mengambil jarak serta tidak berhubungan secara erat dengan orang lain atau kelompok lain, juga merupakan kecenderungan untuk merugikan dan tidak membantu orang lain atau kelompok lain. “Efek dari prasangka adalah menjadikan orang lain sebagai sasaran prasangka; misalnya mengkambinghitamkan mereka melalui stereotipe, diskriminasi, dan penciptaan jarak sosial” (Liliweri, 2003:15-16).

Berdasarkan uraian di atas, dalam komunikasi antaretnis, persepsi individu atau kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainnya akan membentuk sikap sosial berupa prasangka-prasangka sosial. Jika persepsi individu atau kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainnya positif maka akan terbentuk hubungan yang harmonis, yakni adanya kerukunan hidup bersama, saling menghormati antarkelompok etnis, saling mempercayai bahwa aktivitas individu atau kelompok etnis yang satu tidak dipandang sebagai ancaman bagi individu atau kelompok etnis lainnya, serta terbentuknya suatu bentuk kerja sama dalam bidang sosial kemasyarakatan antarindividu maupun kelompok etnis lainnya bagi tercapainya tujuan masing-masing individu atau kelompok etnis. Sebaliknya, jika persepsi individu atau kelompok etnis terhadap kelompok etnis lainnya negatif, maka kondisi demikian merupakan suatu hal yang potensial bagi munculnya konflik antaretnis. Jika hal demikian terjadi maka perlu diperhatikan umpan balik sebagai alternatif-alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut:



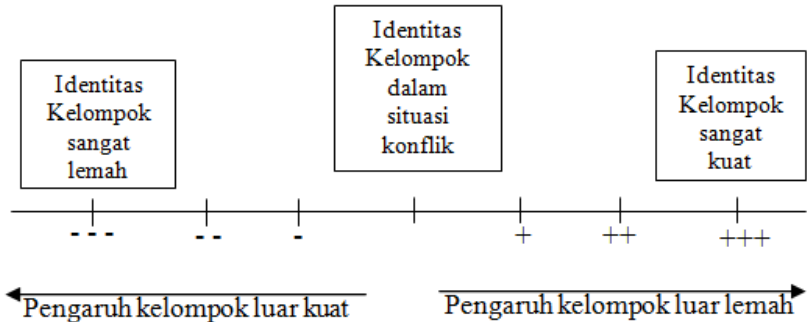
Gambar 4.1 Persepsi individu/kelompok etnis terhadap individu atau kelompok etnis lainnya dalam proses komunikasi

4.2 Prasangka Sosial dalam Komunikasi Antaretnis

Prasangka merupakan pernyataan-pernyataan umum yang didasarkan atas beberapa pengalaman dangkal yang tidak teruji. Karenanya, prasangka merupakan penilaian secara emosional dan cenderung menghakimi pihak lain secara negatif. Prasangka sudah barang tentu mengandung motif-motif kecurigaan yang lahir dari subyektivitas individu maupun kelompok terhadap kelompok lain yang biasanya ditandai dengan rasa superioritas dari kelompok mayoritas yang memandang inferior terhadap kelompok minoritas. Dengan demikian, adanya sikap prasangka sosial akan menjadi sumber yang potensial bagi perpecahan/disintegrasi yang dapat mengakibatkan terjadinya konflik. Ketika kondisi demikian terjadi, maka akan terjadi pula kemandegan komunikasi sosial budaya antarkelompok, ras, etnik ataupun golongan. Dengan kata lain, prasangka menjadi sumber potensial disharmonisasi dan disintegrasi. Disharmonisasi dan disintegrasi dalam perspektif ini muncul karena adanya kesenjangan informasi serta sikap sinis dan persaingan yang didasarkan bukan atas prestasi melainkan pada rasa kalah dan tidak percaya diri. Dalam hal demikian, prasangka akan menjadi jarak sosial antara berbagai kelompok dalam masyarakat yang cenderung tidak adaptif, tidak

fleksibel, bersikap tertutup dan keengganan untuk membuka diri karena berbagai alasan yang tidak rasional.

Intensitas prasangka yang muncul dalam proses komunikasi antaretnis yang menguat dapat menimbulkan terjadinya konflik. Konflik antarkelompok etnis juga dapat memperkuat identitas kelompok, hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Coser (Poloma, 2000:107) bahwa “konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya”. Dengan memperkuat identitas kelompok, pengaruh-pengaruh yang berkemungkinan akan merongrong stabilitas kelangsungan hidup suatu kelompok yang sedang menghadapi konflik dapat dihindarkan. Sebaliknya, identitas suatu kelompok yang tidak begitu kuat, lebih cenderung tidak akan bertahan dalam menghadapi pengaruh-pengaruh dari kelompok lainnya dalam situasi konflik. Dengan kata lain, semakin lemah identitas suatu kelompok, maka semakin kuat pengaruh-pengaruh kelompok luar dalam situasi konflik. Sebaliknya, semakin kuat identitas suatu kelompok, maka semakin lemah pengaruh-pengaruh kelompok luar dalam situasi konflik. Hal tersebut dapat diilustrasikan dalam suatu garis kontinum sebagai berikut:



Gambar 4.2 Tingkat ketahanan kelompok dalam menghadapi pengaruh-pengaruh kelompok lainnya dalam situasi konflik antarkelompok etnis

BAB 5

BENTUK KONFLIK DALAM KOMUNIKASI ANTARETNIS

5.1 Etnosentrisme

Etnosentrisme berasal dari bahasa Yunani, terdiri dua kata dan dapat dipecah menjadi komponen-komponennya (Toomey & Leeva: 2012). *Ethno* mengacu pada "kelompok etnis atau budaya seseorang," dan sentrisme berarti bahwa "*Ingroup*" harus dipandang sebagai pusat dunia." *Ingroup* dalam hal ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk dari kelompok manusia yang memiliki kesamaan kepentingan dengan diri kita. Contohnya adalah pada suatu kelompok etnis tertentu, dimana dalam kesehariannya mereka saling berbagi kesamaan nilai-nilai hidup yang diwariskan secara turun menurun. Hal ini menyebabkan rasa kebersamaan dalam kesamaan sehingga menumbuhkan sikap memiliki satu sama lainnya. Hal ini mendorong mereka untuk berkumpul dan membentuk jaringan eksklusif. Sumner dalam Toomey & Leeva (2012) mendefinisikan etnosentrisme sebagai sebuah terma atas suatu pandangan yang melihat bahwa kelompok yang dimilikinya adalah pusat dari segalanya dan kelompok lain bukanlah apa-apa. Lebih jauh dijelaskan bahwa etnosentris merupakan suatu sikap bangga

terhadap kelompok sendiri dan arogan terhadap kelompok lain serta memiliki kecenderungan untuk menghina. Franz Boas, salah satu pendiri antropologi modern, percaya bahwa manusia selalu cenderung memiliki paham etnosentris dan bahwa pemahaman *ingroups* terhadap budaya lain akan selalu karena adanya pengaruh latar belakang sosial budaya yang dimiliki di setiap individu (Toomey & Leeva: 2012).

Etnosentrisme juga mengandung arti bahwa kita memiliki pandangan dan standar bahwa kelompok *ingroup* kita sebagai lebih penting ataupun superior dibandingkan dengan kelompok lainnya. Kelompok lain yang dimaksud adalah kelompok orang yang memiliki perbedaan dengan *ingroup* yang kita miliki. Kelompok lainnya ini juga sering disebut dengan *outgroup*. *Outgroup* seringkali dinilai kurang memiliki arti oleh kelompok *ingroup*. Hal ini didasari karena perlakuan dan penilaian yang diterapkan berdasarkan pada standar dan nilai *ingroup*. Etnosentrisme dapat dikatakan sebagai sebuah pemahaman untuk mempertahankan bahwa budaya *ingroup* lebih unggul dari budaya lain dan atas hal tersebut maka menumbuhkan pemikiran bahwa cara hidup yang digunakan adalah yang paling masuk akal dan tepat dibandingkan dengan kelompok lain. Sebagai hasilnya adalah *ingroup* berharap bahwa semua kelompok lain juga harus mengikuti cara hidup dan berperilaku seperti yang mereka lakukan.

Etnosentris dapat terbentuk semakin kuat melekat dan terus dilestarikan pada pribadi individu melalui proses sosialisasi budaya secara kolektif. Budaya *ingroup* akan diwarisi dari generasi ke generasi karena anggota dalam kelompok tersebut sudah merasa akrab dan nyaman dengan standar pada norma dan nilai tersebut. Etnosentrisme dapat berupa sikap yang diperlihatkan secara jelas terang-terangan maupun yang tersembunyi terhadap anggota kelompok *outgroup*. Sikap etnosentris cenderung muncul berdasarkan pada tiga alasan: (1) anggota *ingroup* cenderung mendefinisikan nilai budaya yang dimiliki adalah sebagai sesuatu

yang alami dan benar dan apa yang terjadi dalam budaya lain sebagai sesuatu yang tidak alami dan tidak benar; (2) anggota *ingroup* melihat nilai-nilai, kebiasaan, norma, aturan dan peran budaya mereka bahwa berlaku universal; dan (3) anggota *ingroup* cenderung mengambil jarak dari kelompok *outgroup*, terutama ketika identitas kelompok kita terancam atau diserang.

Ketika kita berinteraksi dengan anggota *outgroup*, kecenderungan sikap etnosentris kita dapat muncul karena adanya persepsi *ingroup* yang merasa menjadi superior. Hal ini didasari dengan keyakinan yang mereka bentuk sendiri bahwa mereka berbeda dan memiliki posisi khusus. Posisi khusus yang dimaksud dalam hal ini adalah mereka memiliki satu aset *intangible* yang melekat pada seseorang yang biasanya didasarkan pada warna kulit, etnis, jenis kelamin, status sosial, lokasi geografis dan lainnya yang membuat mereka menjadi istimewa dibanding orang lain. Bahwa persepsi dan keyakinan bahwa mereka adalah superior karena keiistimewaan yang dimiliki ini secara tidak sadar memicu untuk timbulnya sikap etnosentris karena membuat seseorang merasa berbeda dan menjadi lebih unggul dibanding dengan kelompok lain. Budaya *outgroup* dinilai sebagai bentuk yang inferior dan tidak bernilai. Sikap etnosentris juga dapat menggiring tumbuhnya tindakan penolakan atas perbedaan budaya *ingroup* dan *outgroup*. Bahwa mereka meyakini budaya *ingroup* yang mereka sedang jalani saat ini adalah yang psatu-satunya yang paling benar. Mereka menolak adanya budaya lain dengan melakukan tindakan isolasi baik secara psikologis maupun fisik. Anggota *ingroup* cenderung melakukan tindakan agresif untuk melenyapkan perbedaan tersebut.

Neulip (2017) dalam konsep yang lebih modern, berpendapat bahwa etnosentrisme harus dilihat sebagai satu kesatuan rangkaian yang terus berjalan dan hidup seiring waktu bersama dinamika masyarakat dan bahwa tidak semua etnosentrisme selalu negatif. Neuliep dan McCroskey lebih dalam juga berpendapat bahwa etnosentrisme adalah hasil alami dari

proses enkulturasi dan tidak selalu berdampak merugikan dan negatif. Satu ketika etnosentrisme dapat berfungsi sebagai aset yang sangat berharga ketika kondisi kelompok *ingroup* sedang berada di dalam keadaan terancam atau diserang. Etnosentrisme sebagai bentuk dasar dari sikap patriotisme dan kesediaan berkorban untuk kelompok mereka. Namun tak dapat dipungkiri bahwa kecenderungan untuk meyakini secara berlebihan bahwa kelompok *ingroup* mereka yang paling benar bisa sangat berbahaya dan mengarah pada bentuk etnosentrisme yang menghasilkan prasangka, diskriminasi, dan bahkan pembersihan etnis.

Dalam tinjauan hubungan antar etnik, manifestasi dari prasangka adalah, (1) *antilocution*, yang mendiskusikan kelompok lain dari segi negatifnya, (2) *avoidance* : menghindari dari kelompok yang tidak disukai, (3) *discrimination* : Mengucilkan kelompok tertentu dalam pergaulan dan interaksi sosial, ekonomi maupun politik, karena ketidaksukaan, (4) *violence*, serangan fisik terhadap orang atau kelompok lain, karena emosi yang meningkat, dan (5) *extermination*, pemusnahan satu per satu atau secara massal terhadap kelompok yang tidak disukai.

5.2 Stereotip

Fiske dan Russeell dalam Zhang (2017) mengartikan tindakan stereotip sebagai sebuah proses kognitif yang dialami oleh setiap manusia ketika melakukan proses penerimaan informasi yang didapatkan dengan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Hasil dari pengelompokkan tersebut adalah sebuah *labelling* pada setiap kategori sosial yang berbeda. Tindakan stereotip merupakan hal suatu bentuk mekanisme kognitif yang dialami oleh setiap orang, sebagai salah bentuk fenomena sosial, namun sering kali mengarah pada pemaknaan

berlebihan pada nilai-nilai yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan budaya dan sosial di masyarakat.

Schneider dalam Zhang (2017) juga mendefinisikan tindakan stereotip sebagai kualitas penerimaan yang dibentuk seseorang berkaitan dengan kelompok atau kategori sekumpulan orang tertentu. Stereotipe adalah kualitas yang dianggap terkait dengan kelompok atau kategori orang tertentu.” Menurut definisi ini, stereotipe adalah “keyakinan,” “kesan,” “prakonsepsi,” “generalisasi,” “sifat,” “atribut,” “kualitas , dan suatu karakteristik “yang terkait dengan suatu kelompok sosial. Ada pengertian ini menekankan pada hasil dari sebuah proses penerimaan pesan yang dipahami oleh seorang individu yang pada akhirnya akan membentuk suatu nilai terhadap kelompok atau golongan tertentu.

Tindakan stereotip tidak hanya terjadi pada pembentukan dalam ranah kognisi seseorang pada suatu kelompok atau golongan sosial tertentu tetapi juga dapat memunculkan perasaan berdasar pada keyakinan kognitif yang sudah dibentuk. Stereotip berhubungan erat dengan proses pemaknaan suatu informasi dalam ranah kognisi. Stereotip dapat diibaratkan sebagai suatu fungsi pertahanan pada sistem ego dan sistem nilai individu serta pembenaran diri pada kelompok dominan dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan pada hal itu maka kualitas dari nilai *ingroup* akan dinilai lebih baik dibanding dengan nilai dari *outgroup* sehingga terjadi pelabelan terhadap kelompok-kelompok. Oleh karena itu terciptalah suatu keyakinan mengenai "kita" baik, dan "mereka" buruk. Terlebih lagi, stereotip sering menyiratkan sikap antipati terhadap kelompok luar atau *outgroup*. Tindakan stereotip identik dengan sikap prasangka. Ketika kecenderungan perasaan bahwa *ingroup* merupakan kelompok yang dominan dan superior maka terbuka peluang untuk terjadi aksi penghinaan terhadap kelompok *outgroup*. Lebih jauh lagi ketika tindakan stereotip didukung sikap yang etnosentrik ataupun kondisi yang bersifat otoriter maka perilaku

diskriminatif akan dibenarkan, termasuk pengelakkan, pengisolasian, kejahatan kebencian, pembunuhan massal dan genosida, baik di tingkat individu baik tingkat kelompok sosial.

Secara singkat bahwa stereotip adalah generalisasi atas sekelompok orang yang menganut budaya tertentu. Stereotip merujuk pada suatu keyakinan yang berlaku digeneralisasikan, terlalu dibuat mudah, sederhana, atau dilebih-lebihkan mengenai suatu kelompok budaya maupun etnis tertentu. Tindakan stereotip mengacu pada suatu gambaran atau interpretasi tertentu mengenai sifat-sifat dan karakteristik pribadi baik level individu hingga suatu kelompok yang cenderung negatif dan belum pasti kebenarannya. Karakteristik pribadi tersebut terdiri dari ciri kepribadian, perilaku dan nilai pribadi yang diterima sebagai suatu kebenaran kelompok sosial. Kecenderungan untuk menyamakan secara umum karakteristik pribadi terhadap suatu kelompok menandakan terjadi pelabelan secara umum pada suatu kelompok hanya berdasar pada penilaian individu. Schaller (2002) mengemukakan bahwa riset mengenai stereotip etnik menunjukkan bahwa tipisnya jarak antara stereotipe pada level pribadi dan level budaya. Stereotip pada kelompok budaya seyogyanya dapat dilihat sebagai seperangkat keyakinan yang terbentuk dalam komunitas-komunitas tertentu sebagai akibat dari proses kebudayaan yang walaupun demikian, pada dasarnya seperangkat keyakinan stereotipe itu sendiri umumnya bersumber dari interaksi individu-individu dalam suatu kelompok tertentu.

Stereotip dapat menjadi penghambat dalam proses komunikasi antar budaya karena stereotip dapat menimbulkan penilaian negatif antar suku dan etnis. Seringkali stereotip juga terbentuk pada orang-orang yang berprasangka sebelum orang tersebut mempunyai kesempatan untuk berinteraksi. Pemikiran ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, seperti pengaruh dari lingkungan sosial. Seseorang mendapat pengaruh dari informasi yang beredar di lingkungan sosialnya seperti keluarga dan kelompok *ingroup* di lingkungan tempat tinggal mereka. Faktor

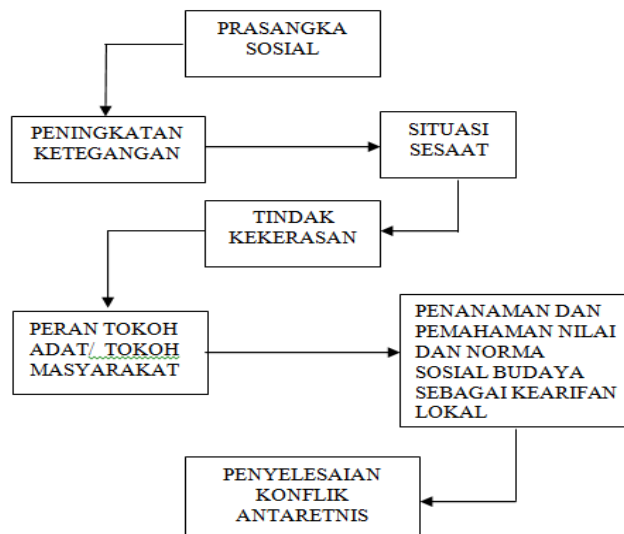
yang lainnya adalah pengalaman individu yang membentuk stereotip seseorang. Pengalaman diciptakan oleh cara kita menafsirkan peristiwa dan setiap orang berbeda-beda satu sama lain dalam menginstruksi peristiwa. Pengalaman terdiri dari penafsiran peristiwa secara terus-menerus. Faktor yang ketiga adalah faktor kontak pribadi yang lebih intim. Lebih jauh lagi, apabila kebenaran akan stereotip tersebut benar-benar terjadi pada interaksi pribadi secara langsung tentunya tuduhan stereotip tersebut akan di generalisir pada seluruh kelompok etnis terkait. Hal ini tentu saja akan memicu timbulnya kesalahpahaman dan hambatan pada komunikasi antar budaya. Ketika terjadi noise atau hambatan pada komunikasi antar budaya maka dapat memicu lahirnya konflik.

Stereotip dan prasangka dapat menyebabkan tidak terjadinya komunikasi antarbudaya. Stereotip dan prasangka negatif yang kuat, menyebabkan orang cenderung untuk mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi dan kontak langsung dengan orang-orang dari kelompok budaya atau subbudaya yang tidak disukai. Stereotip dan prasangka yang berlebihan cenderung menimbulkan hal-hal negatif selama terjadinya proses interaksi komunikasi antarbudaya, sehingga mempengaruhi kualitas dan intensitas interaksi. Pelabelan dalam tindakan stereotip tidak selalu benar, bahkan ada yang tidak benar sama sekali dan sebagian tidak benar. Pelabelan atau stereotip juga tidak bersifat laten tetapi dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu. Tindakan stereotip menunjuk pada arah penilaian baik berupa nilai positif maupun negatif, yang berakibat pada hadirnya rasa suka ataupun rasa benci. Intensitas pelabelan atau stereotip berpengaruh pada seberapa kuatnya keyakinan seseorang dalam menyakini penilaian nya tersebut. Jika tindakan stereotip dan prasangka terlalu ekstrim maka akan berakibat pada perilaku antilokusi penghindaran diri, serangan fisik, pemusnahan dan diskriminasi aktif terhadap kelompok orang yang tidak disukai.

Konflik antaretnis biasanya diawali oleh perselisihan antarindividu. Individu yang bersangkutan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada kelompoknya masing-masing. Pembeneran masing-masing kelompok atas laporan anggota kelompoknya tanpa melihat bagaimana kejadian sebenarnya dapat menimbulkan konflik antarkelompok yang lebih luas. Pembeneran masing-masing kelompok etnis atas laporan anggota kelompoknya tentang peristiwa yang dialami oleh individu yang bersangkutan dipengaruhi oleh prasangka-prasangka sosial yang sebelumnya telah terbentuk. Newcomb dkk (1985:586) mengungkapkan: “Jika norma-norma yang berbeda mendukung adanya prasangka antara dua kelompok, insiden-insiden terbuka kadang terjadi dan menarik perhatian umum kepada pertentangan itu”. Tindak kekerasan yang terjadi antarkelompok etnis sebagaimana dikemukakan di atas, sebagai akibat dari ketegangan yang semakin meningkat. Ketegangan yang semakin meningkat ini diawali oleh prasangka sosial yang terus berkembang pada kelompoknya masing-masing. Masing-masing individu yang dalam suatu kelompok yang mendapat terpaan bentuk-bentuk prasangka dari anggota kelompok lainnya, akan membentuk sikap emosi kelompok yang mengarah pada peningkatan ketegangan antarkelompok. Sikap emosi kelompok akan membentuk kekompakan kelompok. Keadaan demikian mengakibatkan terjadinya penyempitan persepsi, yakni individu sebagai anggota kelompok tidak lagi mencari pembeneran atas suatu peristiwa yang menimpa individu dalam kelompoknya tetapi ia langsung bereaksi dengan tindak kekerasannya yang segera diikuti oleh anggota kelompok yang lainnya. Tindakan kekerasan demikian merupakan tindakan sesaat sebagai akibat dari ketegangan yang semakin meningkat. Hal demikian dijelaskan oleh Newcom dkk (1985:590-591) sebagai faktor yang memudahkan timbulnya kekerasan; yakni: (1) suatu keadaan prasangka bersama yang telah ada sebelumnya terhadap kelompok dimana korban tindak kekerasan itu menjadi anggotanya; (2) suatu situasi sesaat yang bertindak meningkatkan rasa terancam yang sudah ada yang

disebabkan oleh kelompok lain/ peningkatan ketegangan; (3) penegasan situasi sesaat sebagai situasi yang membenarkan penggunaan sejumlah norma untuk melakukan tindak kekerasan; dan (4) bertambahnya sifat mudah terangsang yang diekspresikan kedalam tingkah laku yang mudah dikuasai secara sempit dan eksklusif oleh norma-norma yang membenarkan tindak kekerasan. Dua kondisi yang pertama mendahului terjadinya tindak kekerasan, sedang dua yang terakhir timbul dalam proses komunikasi antarindividu dalam kelompok yang bersangkutan, terutama proses fasilitasi sosial dan perkuatan dalam kelompok/ kekompakan kelompok.

Melalui penanaman dan pemahaman yang mendalam tentang norma dan nilai-nilai sosial budaya konflik antaretnis tersebut dapat dihindarkan. Terjadinya tindak kekerasan antaretnis sebagai akibat dari prasangka sosial yang telah terbentuk sebelumnya, sebagaimana dikemukakan di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 5.1 Pola tindak kekerasan yang terjadi dalam komunikasi antaretnis sebagai akibat dari prasangka sosial yang telah terbentuk sebelumnya

BAB 6

PERAN KEPEMIMPINAN DALAM KOMUNIKASI ANTARETNIS

6.1 Pengertian Kepemimpinan

Dalam pandangan Soekanto (2003:243) peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2003:244.) Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa dia sedang menjalankan suatu peranan. Dalam hidup bermasyarakat, seseorang memiliki perannya masing-masing yang menandakan bahwa mereka melakukan sesuatu yang diberikan untuk masyarakat dan masyarakat juga memberikan peluang dan kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Secara tidak langsung dengan memainkan sebuah peranan dalam masyarakat maka secara otomatis akan berhubungan dengan bagaimana seseorang akan berperilaku.

Sehingga peran menjadi garis batasan pada seseorang dalam berperilaku di tengah-tengah masyarakat.

Pengertian kepemimpinan bersifat universal, berlaku dan terdapat pada berbagai bidang kehidupan manusia. Apabila kita menelaah sejarah pertumbuhan peradaban manusia, telah banyak menunjukkan bukti bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat, adalah kuat tidaknya kepemimpinan. Dikemukakan oleh Krech *at.al.* (1962:423) ada dua prinsip yang dapat digunakan untuk mengetahui pemimpin suatu kelompok, yakni:

1. Kita menanyakan kepada anggota kelompok siapa yang mempunyai pengaruh lebih besar terhadap kelompok (*self report method*); dan
2. Kita dapat bertanya kepada pengamat kelompok tersebut untuk menyebutkan nama orang yang paling berpengaruh bagi anggota kelompok yang menjadi obyek pengamatannya, atau dengan cara mencatat dan mengkaji frekuensi yang relatif dari tindakan yang menentukan anggota kelompok (*the observation method*).

Kepemimpinan sebagai istilah umum dapat dirumuskan sebagai proses dengan sengaja mempengaruhi orang lain dalam merealisasikan tujuan kelompok. Beberapa ahli mengemukakan batasan kepemimpinan secara umum, yaitu di antaranya Good (1973:313) memberikan pengertian bahwa “kepemimpinan adalah *the ability and readiness to inspire, guide, direct, organisation manage other*”. Artinya, kepemimpinan merupakan suatu kemampuan dan kesiapan seseorang untuk mempengaruhi, membimbing dan mengarahkan atau mengelola orang lain agar mau berbuat sesuatu demi tercapainya tujuan bersama. Dari pengertian yang dikemukakan oleh Good ini seseorang yang ingin diakui sebagai pemimpin harus memiliki kelebihan dalam beberapa fungsi yang dieksplisitkan di atas yakni: mempengaruhi, membimbing sampai pada kemampuan mengelola orang lain.

Pendapat lain yang agak sederhana dikemukakan oleh Wiles (dalam Burhanuddin, 1994:62) memberikan batasan bahwa “Kepemimpinan merupakan segenap bentuk bantuan yang dapat diberikan oleh seseorang bagi penetapan dan pencapaian tujuan kelompok”. Hicles dan Place (dalam Moenir, 1984:216) mengatakan, “*Leadership is the art of influencing human behavior, ability to handle people*”. Bunder (dalam Widjaja, 1985:12) juga memandang kepemimpinan sebagai “*The art of inducing others to do what one wants then to do*”. Sedangkan O'Donnell (dalam Widjaja, 1985:12) memandang kepemimpinan sebagai “*The activity of persuading people to cooperate in the achievement of the common objective*”. Nawawi (1985) melihat kepemimpinan sebagai proses mengarahkan, membimbing, mempengaruhi dan mengawasi pikiran, perasaan atau tindakan dan tingkah laku orang lain. Abdurachman (1971:25) memberikan batasan bahwa “kepemimpinan sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan orang-orang mengikuti pemimpin”. Atmosudirdjo (1982:149) merumuskan kepemimpinan sebagai “suatu kepribadian (*personality*) seseorang yang mendatangkan keinginan pada sekelompok orang untuk mencontohnya atau mengikutinya atau yang memancarkan pengaruh yang tertentu, sehingga membuat sekelompok orang-orang mau melakukan apa yang dikehendakinya”. Sedangkan Anderson dan Davis (dalam Indrachrudi, ed., 1984:11) mengemukakan konsepnya, “*leadership is that quality which evokes from coworkers their voluntary active participation and assuming responsibilities which contribute the growth in relationship, attitude, and activities of the group*”.

Berdasarkan pendapat tersebut, kepemimpinan sebagai sifat, kualitas kepribadian dan kemampuan-kemampuan tertentu yang dimiliki oleh seseorang itu memungkinkan dia dapat berhasil mempengaruhi anggota-anggota kelompoknya. George R. Terry (dalam Winardi, 1970:59) merumuskan, “*Leadership is the activity of influencing people for strive willingly for group objectives*”. Beberapa hal pokok yang didapatkan dari definisi tersebut adalah

- 1) adanya usaha dari si pemimpin untuk mempengaruhi orang lain tidak dibatasi oleh jenis kelompok atau organisasinya dan
- 2) tujuan-tujuan kelompok yang akan dicapai.

Penting diperhatikan di sini bahwa definisi-definisi tersebut tidak menyinggung suatu tipe organisasi. Hal ini berarti apabila dalam situasi tertentu seseorang berusaha mempengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang-orang maka proses kepemimpinan sedang terjadi. Demikian pula apabila definisi tersebut menyinggung soal pemimpin dan pengikut, hal itu tidak berarti bahwa hanya membicarakan soal hubungan hirarkhi atau struktural, seperti hubungan antara atasan dan bawahan. Setiap saat seseorang mencoba mempengaruhi perilaku orang lain, orang itu dapat berpotensi sebagai pemimpin, demikian pula mereka yang mengikuti dengan sukarela maka mereka berpotensi sebagai pengikut, tidak jadi masalah apakah orang itu adalah atasan, teman, atau bawahan.

Menurut pengertian kepemimpinan yang telah dikemukakan tersebut dapat diangkat beberapa hal yakni :

- 1) Adanya pengaruh. Ada kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi kelompok sehingga mereka bersedia dengan suka rela, bukan paksaan untuk melakukan kegiatan.
- 2) Dalam situasi tertentu. Kepemimpinan tidak bisa dipisahkan dengan situasi atau keadaan yang khusus di mana pengaruhnya sebagai pemimpin itu dinyatakan. Karena itu mereka yang berhasil sebagai pimpinan dalam situasi tertentu, mungkin tidak dalam situasi lain.
- 3) Menggerakkan. Kepemimpinan di sini ditekankan pada usaha menggerakkan pengikutnya agar mereka dengan suka rela bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan kelompok. Sukarela di sini hanya dapat diwujudkan jika pemberian motivasi pemimpin menyentuh motif-motif mereka.

- 4) Kepuasan. Motivasi yang diberikan oleh pemimpin hendaklah berusaha membantu anggota untuk mencapai kepuasan kerjanya.

Setelah mengkaji pendapat-pendapat tentang kepemimpinan pada umumnya, ternyata setiap ahli berbeda mengenai rumusan definisi kepemimpinan. Perbedaan ini pada dasarnya hanya soal visi saja, yang tergantung pada sudut memandang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari berbagai definisi kepemimpinan yakni kepemimpinan mencakup empat hal yang saling interdependen dari fenomena kepemimpinan yaitu:

- 1) Adanya pemimpin dan karakteristiknya.
- 2) Pengikut.
- 3) Adanya tujuan yang hendak dicapai.
- 4) Situasi kelompok dalam mana pemimpin dan pengikut berinteraksi.

6.2 Pemimpin dalam Situasi Krisis

Apabila suatu kelompok menghadapi situasi krisis, seseorang yang dipandang oleh para anggota kelompok yang bersangkutan memiliki karakter tertentu; misalnya memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki keberanian, percaya diri dan memiliki keterampilan tertentu, akan diangkat menjadi pemimpin kelompok dalam upaya mengatasi situasi krisis. Suatu penelitian yang dilakukan oleh Robert L. Hamblin (Krech *at.al.*, 1962:427) pada 24 mahasiswa University of Michigan tentang akibat krisis dalam suatu kepemimpinan, dapat diungkapkan hal sebagai berikut:

- 1) Para pemimpin lebih banyak mempunyai pengaruh pada saat menghadapi situasi dalam keadaan krisis dari pada saat situasi dalam keadaan normal;

- 2) Kelompok akan menolak pemimpin yang lama serta menggantikannya dengan pemimpin yang baru jika pemimpin lama tidak dapat menentukan dan tidak dapat mengatasi situasi krisis.

Dalam kelompok etnis, para pemimpin (tokoh masyarakat, tokoh adat/budaya, tokoh agama, dan tokoh pemuda) diharapkan dapat menjadi tokoh sentral dalam menghadapi situasi krisis antaretnis. Sebagaimana dikemukakan pada uraian sebelumnya, bahwa hubungan antarkelompok etnis merupakan hubungan yang potensial untuk terjadinya konflik. Karenanya, dari kepemimpinan kelompok etnis yang bersangkutan melalui pembinaan dan pembimbingan nilai dan norma budaya diharapkan akan tumbuh pada kelompok yang dipimpinnya suatu sikap pengendalian diri, penegakan moral agama, penumbuhan sikap toleransi antarkelompok etnis, dan munculnya sikap tanggung jawab dalam memelihara kebersamaan sebagai upaya mewujudkan kerukunan hidup antarkelompok etnis. Dengan terciptanya kerukunan hidup antarkelompok etnis maka masing-masing kelompok etnis akan memiliki ketenangan dan kedamaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, saling hormat-menghormati antaranggota kelompok etnis yang dilandasi oleh sikap saling percaya-mempercayai dan meminimalisasi bahkan menghilangkan adanya sikap curiga-mencurigai (prasangka sosial) sehingga dapat terwujud adanya sikap kerja sama antarkelompok etnis dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian peran para pemimpin kelompok etnis dalam hubungannya dengan upaya mewujudkan kerukunan hidup antarkelompok etnis yakni mendorong terciptanya perdamaian dan dapat meredam konflik antarkelompok etnis.

6.3 Nilai dan Norma Budaya Lokal sebagai Alat Pemersatu Antaretnis

Kehidupan manusia mungkin akan kacau jika tidak ada keteraturan yang dapat diandalkan dalam menjalani proses kehidupannya. Keteraturan tersebut dalam segala aspek kehidupan. Keteraturan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah keteraturan yang mendapat pengakuan dari dua orang atau lebih yang terlibat dalam proses komunikasi sosial, terlebih bagi mereka yang memiliki latar sosial budaya maupun agama yang berbeda, saling berinteraksi dalam suatu proses komunikasi, akan sangat memerlukan keteraturan-keteraturan tersebut. Keteraturan demikian ada yang berlaku secara luas di masyarakat, ada juga yang berlaku hanya bagi sekelompok kecil orang atau bahkan hanya berlaku untuk dua orang yang telah membuat kesepakatan untuk kepentingan-kepentingan tertentu dalam menjalani proses kehidupannya. Dengan kata lain, keteraturan tersebut ada yang bersifat umum, ada juga yang bersifat khas. Selain itu, keteraturan tersebut, ada yang bersifat formal dan ada yang bersifat tidak formal; bahkan ada yang memiliki kekuatan moral dan ada juga yang tidak memiliki kekuatan moral. Namun kesemua keteraturan tersebut memiliki persamaan, yakni sama-sama melukiskan suatu situasi atau suatu keadaan tertentu yang mengatur tindakan orang-orang dalam suatu proses komunikasi. Keteraturan tersebut adalah nilai dan norma. Sebagaimana dikemukakan oleh Krech *at.al.* (1962:349), “Nilai merupakan standard tingkah laku tentang baik dan buruk (positif atau negatif) yang dipahami bersama oleh masyarakat”. Nilai budaya membimbing manusia untuk menentukan apakah sesuatu itu boleh atau tidak dilakukan. Nilai budaya akan membentuk sikap anggota masyarakatnya tentang sesuatu apakah benar atau salah, baik atau buruk, jelek atau indah berkenaan dengan suatu peristiwa, tindakan, ataupun suatu keadaan tertentu. Berbeda dengan nilai yang meliputi tentang sesuatu apakah benar atau salah, baik atau buruk, jelek atau indah berkenaan dengan suatu peristiwa, tindakan, ataupun

suatu keadaan tertentu, maka norma meliputi apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat.

Ciri utama dari norma kelompok sebagaimana dikemukakan oleh Newcomb (1985:306) adalah “norma-norma tersebut menggambarkan penerimaan bersama mengenai suatu peraturan yang merupakan ketentuan cara-cara mempersepsi, berpikir, merasa atau bertindak”. Nilai budaya akan membentuk sikap anggota masyarakatnya tentang sesuatu apakah benar atau salah, baik atau buruk, jelek atau indah berkenaan dengan suatu peristiwa, tindakan, ataupun suatu keadaan tertentu. Dikemukakan oleh Garna (1996:168) “nilai-nilai menyediakan prinsip umum dan yang menjadi acuan dalam membuat keputusan, pilihan tindakan, dan tujuan tertentu bagi para anggota suatu masyarakat”. Berbeda dengan nilai, norma meliputi apa yang harus dilakukan dan apa yang sebaiknya tidak dilakukan dalam suatu kelompok masyarakat. Dengan demikian norma merupakan kontrol atas suatu perilaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Krech *at.al.* (1962:351), “Norma yang terdapat dalam suatu masyarakat merupakan alat pengatur tingkah laku para anggotanya”.

Setiap daerah memiliki nilai budaya, yakni yang disebut nilai budaya lokal yang merupakan tolok ukur standar dalam mengembangkan sikap-sikap para anggota masyarakatnya dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Nilai budaya ini merupakan ketentuan yang mengatur tata hubungan baik antarindividu maupun antarkelompok yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan. Selama individu maupun kelompok yang terlibat dalam suatu proses interaksi tersebut secara bersama-sama menerima peraturan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur tata hubungan antarindividu maupun antarkelompok yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan, nilai dan norma budaya tersebut akan tetap bertahan dan terpelihara. Bertahannya nilai dan norma budaya dalam suatu masyarakat,

bukan karena masyarakat tersebut memelihara atau mempertahankannya, melainkan adanya suatu kepercayaan dari individu maupun kelompok yang ada di dalam masyarakat tersebut terhadap nilai dan norma budaya telah mampu mengatur berbagai tata hubungan di dalam masyarakat yang bersangkutan sehingga terjadi keseimbangan dalam menjalani proses kehidupan bermasyarakat. “Suatu norma kelompok tidak mungkin bertahan, kecuali bila norma itu sedikit banyak ada gunanya untuk kelompok sebagai suatu keseluruhan maupun untuk individu sebagai anggota kelompok” (Newcomb dkk., 1985:319). Dijelaskan oleh Porter dan Samovar (Mulyana, 2001:27) bahwa “Nilai-nilai dalam suatu budaya menampakkan diri dalam perilaku para anggota budaya yang dituntut oleh budaya tersebut”.

Untuk tidak terulang kembali konflik antaretnis yang pernah terjadi, kiranya perlu digali dan dipahami kembali bentuk-bentuk kearifan lokal yang mampu menjadi perekat hubungan sosial dalam konteks akulturasi antarbudaya. Nilai dan norma budaya sebagai suatu bentuk kearifan lokal diyakini mampu menjadi nilai yang dapat diaplikasikan bersama di masyarakat.

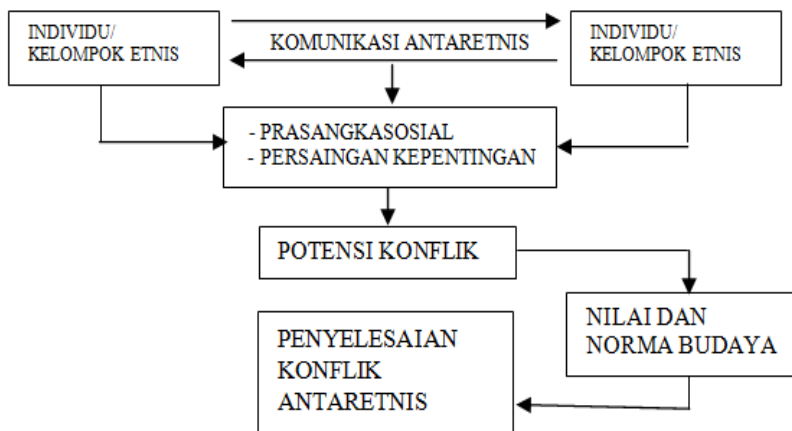
Filosofi etnis Lampung yang menjadi motto Provinsi Lampung, yaitu Sang Bumi Ruwa Jurai. Filosofi itu lahir dengan latar belakang sejarah, budaya, dan gagasan besar yang hendak dicapai masyarakat Lampung. Filosofi Sang Bumi Ruwa Jurai merupakan pemahaman mendalam atas kondisi masyarakat Lampung yang memiliki dua akar kultural: masyarakat adat dan masyarakat pendatang. Masyarakat pun terdiri atas dua subkultur: subkultur Saibatin dan subkultur Pepadun. Masyarakat adat dan masyarakat pendatang yang memiliki kultur tersendiri melahirkan proses akulturasi dan asimilasi.

Filosofi Sang Bumi Ruwa Jurai menggambarkan proses kehidupan sosial yang berlangsung terus-menerus pada masyarakat Lampung sehingga menjadikan masyarakat Lampung sebagai masyarakat yang terbuka dalam menerima orang lain, atau menerima kultur lain. Makna terpenting dari filosofi Sang

Bumi Ruwa Jurai itu mengandung harapan akan kondisi ideal masyarakat Lampung yang aman, damai, berbeda dalam persatuan dan bersatu dalam perbedaan. Sikap akomodatif, saling terima dengan tangan terbuka, bisa menjadi modal berharga untuk pembangunan Provinsi Lampung.

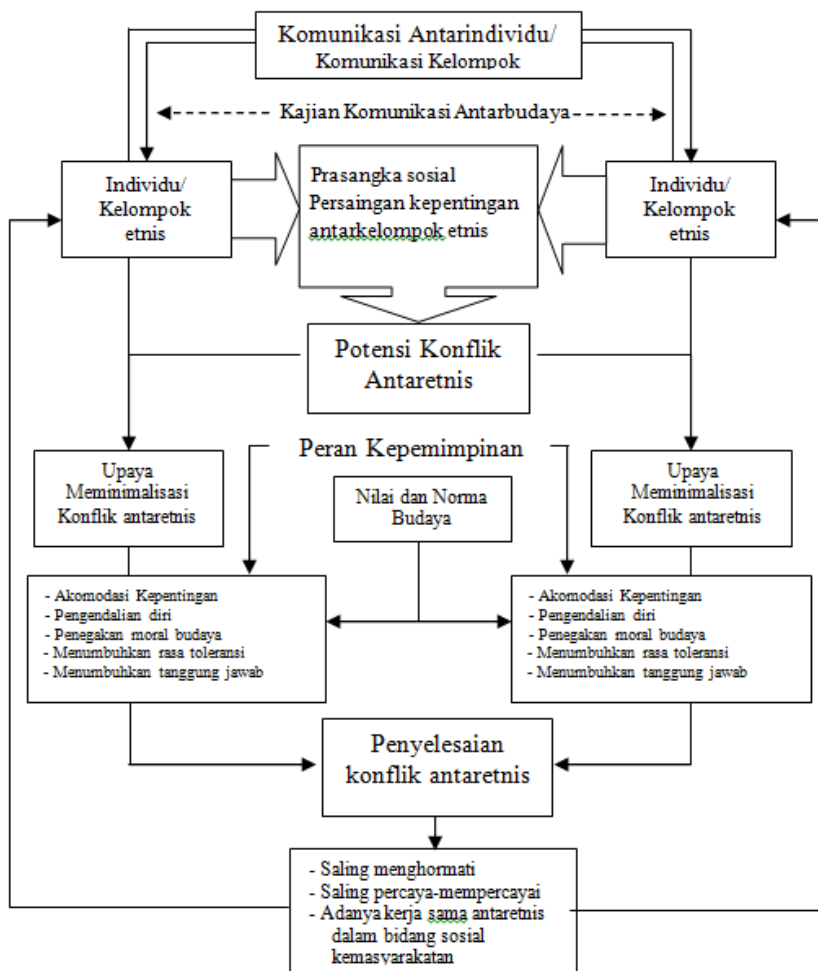
Proses perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Lampung sejauh ini berjalan dengan aman dan damai, praktis tanpa menimbulkan gejolak yang berarti. Hal itu terjadi karena masyarakat Etnis Lampung memiliki piil pesenggiri, tata perilaku yang didasari oleh ketinggian etika. Piil pesenggiri meliputi: 1) Juluk-Adek; Juluk-adek adalah identitas utama yang melekat pada orang Lampung. Juluk-adek diatur dalam tata cara adat. Karena juluk-adek berkaitan dengan masyarakat adat, setiap orang wajib menjaga juluk-adek yang sudah diberikan. Wajib menjaga sikap dan perilakunya di tengah masyarakat. 2) Nemui-Nyimah; Nemui-nyimah bermakna gemar bersilaturahmi atau berkunjung dan murah hati atau suka memberi. Nemui nyimah harus dilandasi dengan keikhlasan. Itu identitas orang Lampung yang harus dijaga. Dalam kondisi sekarang, nemui-nyimah harus benar-benar digalakkan demi terciptanya masyarakat yang aman, damai, saling bekerja sama, dan bergotong royong. 3) Nengah-Nyappur; Nengah-nyappur bermakna sikap toleran antarsesama, menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Dalam masyarakat Lampung yang plural, prinsip nengah-nyappur ini wajib dijunjung tinggi agar tercipta tatanan sosial yang harmonis. 4) Sakai-Sambaiyan; Sakai sambaiyan berarti tolong-menolong, solidaritas, dan gotong royong, setiap orang Lampung, semua yang ada di wilayah Lampung, wajib melakukan sakai-sambaiyan, saling tolong, membangun solidaritas, berpartisipasi pada semua program pembangunan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Indonesia maupun yang sudah dicanangkan oleh pemerintah daerah. 5) Titie Gemattei; Titie gemattei berarti mengikuti kebiasaan yang baik. Orang Lampung wajib mengikuti kebiasaan yang baik dari leluhur kita. Karena para leluhur sudah mewariskan budaya, adat, dan kearifannya, dan kita tinggal menjalankan. Tapi

tidak berarti kita harus kaku dengan apa yang kita yakini, apa yang sudah lazim kita lakukan, karena titie gemattei juga mengajak kita untuk beradaptasi dengan perubahan, selama perubahan itu membawa ke arah yang lebih baik. Ambil hal-hal baru yang baik, dan pertahankan hal-hal lama yang baik. Peranan nilai dan norma budaya sebagai dasar bagi terciptanya kerukunan hidup antaretnis diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 6.1 Peranan nilai dan norma budaya sebagai dasar bagi penyelesaian konflik antaretnis

Berdasarkan pemaparan secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka dapat dikemukakan model penyelesaian konflik antaretnis sebagai berikut:



Gambar 6.2 Model Penyelesaian Konflik Antaretnis

Keterangan gambar 6.2:

Komunikasi antarindividu dan komunikasi antarkelompok dalam perspektif ilmu komunikasi, juga merupakan wilayah kajian komunikasi antarbudaya. Dalam proses komunikasi antarindividu maupun komunikasi antarkelompok, seringkali muncul prasangka sosial dan persaingan kepentingan baik antarindividu maupun antarkelompok. Hal tersebut merupakan potensi untuk terjadinya konflik. Potensi konflik yang terus berkembang akan menjadi konflik. Jika hal tersebut terjadi, maka perlu upaya-upaya meminimalisasi konflik agar konflik yang terjadi baik antarindividu maupun konflik antarkelompok (etnis) tidak berkembang menjadi konflik yang bereskalasi besar. Untuk itu peran kepemimpinan, baik kepemimpinan nonformal maupun kepemimpinan formal memegang peran yang sangat strategis dalam mengakomodasi berbagai kepentingan (kelompok etnis), pengendalian diri, penegakkan moral budaya, menumbuhkan rasa toleransi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam memelihara ketertiban sosial kemasyarakatan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera yang saling menghormati, saling percaya mempercayai, adanya kerja sama yang saling menguntungkan baik antarindividu maupun antarkelompok (etnis).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, 1984. *Human Relation untuk Manajemen*. Jakarta: LAN.
- Atmosudirjo, S. Prayudi. 1982. *Beberapa Pandangan Umum Tentang Pengambilan Keputusan (Decisions Making)*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barth, Fredrik (Ed). 1988. *Kelompok Etnik dan Batasannya: Tatanan Sosial dari Perbedaan Kebudayaan*. Jakarta. UI Press.
- Burhanuddin, 1994. *Analisis administrasi manajemen dan kepemimpinan pendidikan*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Devito, Josep A., 1997. *Komunikasi Antarmanusia*. Penerjemah: Agus Maulana. Jakarta: Professional Books.
- Fisher, B. Aubrey, 1986. *Teori-Teori Komunikasi: Perspektif Mekanistik, Psikologis, Interaksional dan Pragmatis*. Penerjemah: Soejono Trimo. Bandung: Remaja Karya.
- Garna, Judistira K., 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Garna, Judistira K., 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar – Konsep – Posisi*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Goddard, Hugh, 2000. *Menepis Standar Ganda: Membangun Saling Pengertian Muslim-Kristen*. Penerjemah: Ali Noer Zaman. Yogyakarta: Qalam.

- Good, Carter V. (Ed)., 1973. *Dictionary of Education*, third edition. New York: Mc Graw-Hill Book Company.
- Hajar, Ibnu, 1998. *Dinamika Interaksi Antaretnik dalam Mewujudkan Keresasian Sosial di Kodya Medan*. Disertasi. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Hasyim, Umar, 1979. *Toleransi dan Kemerdekaan Beragama dalam Islam Sebagai Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antaragama: Sejarah Toleransi dan Intoleransi Agama dan Kepercayaan Sejak Jaman Yunani*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Imarah, Muhammad, 1999. *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan*. Jakarta: Gema Ilmu.
- Indrafachrudi, dkk., 1984. *Pengantar kepemimpinan pendidikan*. Jakarta: Badan Penerbit Alda.
- Johannessen, Richard. L. 1996. *Etika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Krech, David; Richard S. Crutchfield; dan Egerton L. Ballachey. 1962. *Individual in Society: A Textbook of Social Psychology*. Tokyo: McGraw Hill.
- Le Vine, A. Robert dan Donald T. Chambell. 1972. *Ethnocentrism (Theories of Conflict, Ethnic Attitudes and Group Behavior)*. New York: John Wiley & Son Inc.
- Liliweri, Alo. 1997. *Komunikasi Antarpribadi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Liliweri, Alo. 2003. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta: LkiS.
- Littlejohn. W., Stepen. 1995. *Theories of Human Communication*. California: Wadsworth Publishing Company.

- Lutan, Rusli. 2001. *Keniscayaan Pluralitas Budaya Daerah: Analisis Dampak Sistem Nilai Budaya Terhadap Eksistensi Bangsa*. Bandung: Angkasa.
- Malik, Dedy Djamaluddin dan Iriantara, Yosol (Ed.). *Komunikasi Persuasif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mar'at, 1982. *Sikap Manusia Perubahan serta Pengukuran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Miller, Katherine. 2002. *Communication Theories: Perspectives, Processes and Contexts*. Texas A&M University: Mc Graw-Hill Book Company.
- Moenir, A.S., 1984. *Kepemimpinan kerja*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.
- Muhni, Djuretna A. Imam, 1994. *Moral dan Religi : Menurut Emile Durkheim dan Henri Bergson*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mulyana, Deddy., 2001. *Nuansa-Nuansa Komunikasi: Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy., 2002. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mulyana, Deddy dan Jalaluddin Rakhmat., 2001. *Komunikasi Antarbudaya: Panduan Berkomunikasi dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Myers, Michele Tolela and Gail E. Myers. 1988. *Managing By Communication*, New York, New Newsey, London, Mc.Graw Hill International Book Co.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Hadari. 1985. *Administrasi pendidikan*. Jakarta: Penerbit Gunung Agung.

- Neuliep, James W. 2017. Ethnocentrism And Intercultural Communication. *Intercultural Communication: Handbook Of Communication Science Volume 9*. Edited by Peter J Schulz & Paul Coble. Walter de Gruyter Inc. Boston/Berlin.
- Newcomb, Theodore. M. et. All. *Social Psychology: The Study of Human Interaction*. Holt Rinehart and Winston Inc. New York, Chicago. San Francisco, Toronto, London. Alih Bahasa Noesjirwan Joesoef, dkk. 1985. *Psikologi Sosial*. Diponegoro. Bandung.
- Nottingham, Elizabeth K., 1997. *Agama dan Masyarakat: Suatu Pengantar Sosiologi Agama*. Penerjemah: Abdul Muis Naharong. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poloma.M., Magaret, 2000. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Purwasito, Andrik. 2003. *Komunikasi Multikultural*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Rahmat, Jalaluddin, 1986. *Psikologi Komunikasi*. Karya Remaja. Bandung.
- Ritzer, G. 2016. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penerjemah: Alimanda. Jakarta: Rajawali Pers.
- Samovar, Larry A, Richard E. Potter and Nemi C. Jain. 1981. *Understanding Intercultural Communication*, Belmont – California: A Division Of Wadsworth Inc.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1991. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Schaller, Mark, Conway, L. G., & Tanchuk, T. L. 2002. Selective Pressures on the Once and Futurer Contents of Ethnic Stereotypes: Effects of the Communicability Traits. *Journal of Personality and Social Psychology*, 82, 6, 861 – 877.

- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012
- Susanto, Astrid. S. 1977. *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Binacipta.
- Toomey, Stella Ting & Leeva C. Chung. 2012. *Understanding Intercultural Communication*. Second Edition. Oxford University Press. New York.
- Veerger, K.J. 1986. *Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaya, A.W., 1985. *Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila*. Bandung: Armico.
- Winardi, 1970. *Managemen personalia*. Bandung: Sinar Baru.
- Zastrow, Charles, 1989. *Understanding Human Behavior and The Social Environment*. Chicago: Nelson Hall.
- Zhang, Yunying. 2017. *Streotyping And Communication*. *Intercultural Communication: Handbook Of Communication Science Volume 9*. Edited by Peter J Schulz & Paul Copley. Walter de Gruyter Inc. Boston/Berlin.